

LAPORAN

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK LEMBAGA PENJAMIN TAHUN 2018



jamkrida
banten

SOLUSI
BERSAHABAT
PRIMA



Terdaftar dan Diawasi Otoritas Jasa Keuangan

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 54 /SEOJK.05/2017

TENTANG

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

BAGI LEMBAGA PENJAMIN

1. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

1. Jumlah, nama jabatan, tanggal lulus, dan nomor *fit and proper test*, tanggal pengangkatan oleh RUPS, masa jabatan, kewarganegaraan, dan domisili anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Lulus dan Nomor <i>Fit and Proper Test</i>	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS dan Masa Jabatan (tahun)	Kewarganegaraan	Domisili
1.	Hendra Indra Rachman	Direktur Utama	03-11-2014/ Nomor : KEP-2929/NB.1/2014	19-09-2019 masa Jabatan 5 (lima) Tahun	WNI	Serang
2.	Ahmad Rohendi	Direktur	03-11-2014/ Nomor : KEP-2930/NB.1/2014	19-09-2019 masa Jabatan 5 (lima) Tahun	WNI	Pandeglang
3.	Didin Rasyiddin Wahyu	Komisaris Utama	03-11-2014/ Nomor : KEP-2926/NB.1/2014	19-09-2019 masa Jabatan 4 (empat) Tahun	WNI	Serang
4.	Master Irfan Ibrahim	Komisaris Independen	26-02-2019/ Nomor : KEP - 98 / NB.11/2019	28-04-2019 masa Jabatan 4 (empat) Tahun	WNI	Serang
5.	Zaenal Abidin	D P S	09-02-2016/ Nomor : KEP-14/NB.22/2016	30-03-2016 masa Jabatan 5 (lima) Tahun	WNI	Serang
6.	Fajri Ali	D P S	21-12-2015/ Nomor : KEP-39/NB.22/2015	01-02-2016 masa Jabatan 5 (lima) Tahun	WNI	Cilegon

Biodata singkat Direksi, riwayat kerja dalam lima tahun terakhir, pendidikan, dan gelar Profesi :

a. Direktur Utama

Data Pribadi

1.	Nama	:	Hendra Indra Rachman
2.	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
3.	Tempat/Tanggal Lahir	:	Garut / 17.11.1970
4.	Kewarganegaraan	:	Indonesia
5.	Alamat Rumah	:	Jl. Rancawangi No.7 A Bandung . 40275
6.	Alamat Kantor	:	Jl Raya Pandeglang Km. 4 no 99, Lingk Karundang , Kel. Tembong , Kec. Cipocok Jaya Kota Serang 42126
7.	Nomor KTP/Paspor	:	3273121711700006
8.	NPWP	:	09.377.944.5-424.000
9.	Telp. Kantor/Selular	:	0254- 8487354 / 08122132195
10.	<i>Email</i>	:	hendraindrachman@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

No	Tahun	Institusi	Jurusan/ Program
1.	03.06.1983	Sekolah Dasar Negeri Leuwidaun, Garut	
2.	06.05.1986	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2, Garut	
3.	13.05.1989	Sekolah Menengah Atas Negeri 5, Surabaya	
4.	16.02.1994	Universitas Airlangga, Surabaya.	Strata 1 Fakultas Hukum, Hukum Perdata
5.	01.01.2005	Universitas Padjadjaran, Bandung	Strata 2, Fakultas Ekonomi, Program Magister Manajemen Konsentrasi Manajemen Pemasaran.

Pelatihan dan Seminar yang Pernah Diikuti

No	Tahun	Penyelenggara	Topik dan Uraian Singkat
1.	2014	Otoritas Jasa Keuangan	Workshop Perizinan Perusahaan Penjaminan
2.	2014	LSPMR	Konferensi Nasional Manajemen Risiko II
3.	2015	LSPMR	Certified in Risk Governance Professional
4.	2015	Kemenkeu RI, Dirjen Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko bekerja sama dengan IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten	Seminar Surat Berharga Syariah Negara
5.	2015	Best One Asia Reinsurance Brokers	Pelatihan Pengetahuan Produk Surety Bond dan Bank Garansi
6.	2015	OJK	Workshop Pengembangan Kompetensi Perusahaan Penjaminan
7.	2015	PT. Reasuransi Nasional Indonesia	Pelatihan Teknik Penjaminan Syariah dan Pelaporan Keuangan Syariah
8.	2015	Internal Training	Pelatihan : 1. Manajemen Risiko 2. Manajemen Strategi
9.	2016	Kantor Jasa Akuntansi Muchlish & Wiyantoro	Inhouse Training Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia
10.	12 Mei 2017	LSPMR	Sertifikasi Manajemen Resiko
11.	01 Nov 2018	OJK	Workshop pembekalan dan Penyusunan Peta Kompetensi Rancangan standar RSKKNI
12.	06 Des 2018	Forum Komunikasi Jamkrida	Strategic Negotiation and Communication Training
13.	09 April 2019	LSPMR	Certified in Risk Governance Professional

Riwayat Pekerjaan

No.	Riwayat Pekerjaan	Uraian Pekerjaan
1.	13,5 Tahun Bekerja di PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuku - Teller - Mantri - Account Officer - Pemimpin Cabang Pembantu - Staff Analis Risiko
2.	01.07.2014 Direktur Utama Perusahaan Penjaminan Daerah Banten	Bertugas mengelola Badan Usaha Milik Daerah yang memiliki misi mengembangkan bisnis UMKM, khususnya sebagai jembatan UMKM agar mendapatkan fasilitas pembiayaan dari lembaga keuangan.

Uraian Keterampilan Yang dikuasai dan Penguasaan Bahasa Asing

No.	Jenis Keterampilan	Tingkat Penguasaan	Keterangan
1.	Bahasa Inggris	Cukup	

b. Direktur

Data Pribadi

1.	Nama	:	Ahmad Rohendi
2.	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
3.	Tempat/Tanggal Lahir	:	Pandeglang, 6 April 1969
4.	Kewarganegaraan	:	Indonesia
5.	Alamat Rumah	:	Kompleks Bougenvile Blok C-16 Jl. Karang Tanjung Kadu Merak Kec. Karangtanjung , Pandeglang Banten
6.	Alamat Kantor	:	Jl Raya Pandeglang Km. 4 no 99, Lingk Karundang , Kel. Tembong , Kec. Cipocok Jaya Kota Serang 42126
7.	Nomor KTP/Paspor	:	3601250107690001
8.	NPWP	:	25.282.859.5-419.000
9.	Telp. Kantor/Selular	:	0254- 8487354 / 08111222136
10.	Email	:	ahmad.rohendi@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

No	Tahun	Institusi	Jurusan/ Program
1.	1976-1982	SD Negeri 5 Pandeglang	
2.	1982-1985	SMPN 1 Pandeglang	
3.	1985-1988	SMA N 1 Pandeglang	Fisika A1
4.	1988-1994	Universitas Indonesia, Fakultas Teknik	Teknik Metalurgi
5.	2015- 2016	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa – Pasca Sarjana	Magister Akuntansi

Riwayat Pekerjaan

No	Tahun	Nama Perusahaan	Keterangan
1.	2014 – Sekarang	PT. Jamkrida Banten	Masih Bekerja
2.	2012 – 2014	PT. Banten Sarana Gas Industri	Mengundurkan diri
3.	2008 – 2012	PDAM Tirta Albantani Kabupaten Serang	Kontrak Selesai

Uraian Keterampilan Yang dikuasai dan Penguasaan Bahasa Asing

No	Jenis Keterampilan	Tingkat Penguasaan	Keterangan
1	MS-Office	Baik	
2	Bahasa Inggris	Aktif	
3	Bahasa Jepang	Pasif	

Uraian Pelatihan yang pernah diikuti

No	Tahun	Penyelenggara	Topik dan Uraian Singkat
1.	2014	Otoritas Jasa Keuangan	Workshop Perizinan Usaha Perusahaan Penjaminan sebagai peserta.
2.	2015	Nasional RE	Peserta Pelatihan Tehnik Penjaminan Syariah dan Pelaporan Keuangan Syariah

3.	2015	PT. Jamkrida Banten	Narasumber Inhouse Training, - Teknik Penyusunan Laporan - Teknik Penyusunan Proposal Kegiatan Code of Conduct
4.	2016	OJK – LKNB Syariah	Sertifikasi Tingkat dasar Dewan Pengawas Syariah
5.	2016	ISEI	Peserta Pelatihan “Metode Value in Risk”
6.	2016	OJK	Seminar International – Lembaga Keuangan Syariah Keuangan Syariah
7.	2016	Badan Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Prov Banten	Narasumber “ Program penjaminan untuk Peserta Pelatihan kewirausahaan”
8.	2016	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Prov Banten	Narasumber “Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi untuk pelaku Pariwisata”
9.	2017	Inhouse	Pelatihan Front Linner ; Public Speaking, Public relation, Customer Satisfaction
10.	2017	Bank Mandiri	Pelatihan Investasi Pasar Modal
11.	26-27 September 2017	LSPMR	Sertifikasi Manajemen Resiko
12.	09 November 2017	LSPMR	Certified In Risk Governance Professional
13.	28 Agustus 2018	LSPMR	Executive CRGP Forum
14.	12-13 Desember 2018	LSPMR	Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko VI
15.	09-10 April 2019	LSPMR	Certified in Risk Governance Professional

Uraian Keterampilan Yang dikuasai dan Penguasaan Bahasa Asing

No.	Jenis Keterampilan	Tingkat Penguasaan	Keterangan
1.	MS-Office	Baik	
2.	Bahasa Inggris	Cukup	
3.	Bahasa Jepang	Pasif	

Biodata singkat Dewan Komisaris, riwayat kerja dalam lima tahun terakhir, pendidikan, dan gelar profesi :

a. Komisaris Utama

Data Pribadi

1.	Nama	:	Didin Rasyidin Wahyu
2.	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
3.	Tempat/Tanggal Lahir	:	Sumedang, 28 Oktober 1964
4.	Kewarganegaraan	:	Indonesia
5.	Alamat Rumah	:	Jalan Bhayangkara Kp. Dukuh Jaya RT. 03/08 No. 139 Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota – Serang
6.	Alamat Kantor	:	Jl Raya Pandeglang Km. 4 no 99, Lingk Karundang , Kel. Tembong , Kec. Cipocok Jaya Kota Serang 42126
7.	Nomor KTP/Paspor	:	3604012810640157
8.	NPWP	:	09.249.718.9-407.000
9.	Telp. Kantor/Selular	:	0254- 8487354 / 087877550444
10.	<i>Email</i>	:	Didinrw_28@yahoo.co.id

Riwayat Pendidikan Formal

No	Tahun	Institusi	Jurusan/ Program
1.	Desember 1975	SD Negeri 1 Pandeglang	
2.	Juni 1979	SMP Negeri 1 Pandeglang	
3.	Juni 1982	SMEA Negeri Pandeglang	Sekretariat/Tata Usaha
4.	Maret 2000	STIA Maulana Yusuf Banten	Administrasi Negara
5.	Januari 2000	Universitas Tirtayasa Banten	Ekonomi Manajemen
6.	Oktober 2003	STIMA IMMI Jakarta	Magister Manajemen

Riwayat Pekerjaan

No.	Tahun	Nama Perusahaan	Keterangan
1.	2010 – 2012	Bank BJB Syariah Cilegon Branch Manager	<ul style="list-style-type: none"> - Memimpin seluruh staf/pegawai yang ditugaskan di Cabang Cilegon - Melaksanakan pertanggung jawaban yang diberikan oleh Kantor Pusat atas seluruh kegiatan perbankan di wilayah kerja Kota Cilegon dan sekitarnya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan asset.
2.	2012 – sekarang	IAIN SMH Banten – Dosen Luar Biasa	<ul style="list-style-type: none"> - Mengajar di Fakultas Syariah jurusan Ekonomi Islam pada semester ganjil mata kuliah Manajemen Risiko dan Praktikum Perbankan Syariah - Mengajar di Fakultas Syariah jurusan Ekonomi Islam pada semester genap mata kuliah Ekonomi Manajerial dan Teori Ekonomi Makro
3.	2012 – sekarang	STIE Bina bangsa Banten Dosen Luar Biasa	Mengajar di jurusan Manajemen dan Akuntansi pada semester ganjil dan genap mata kuliah Manajemen Aktiva dan Pasiva Bank, Manajemen Pemasaran, Pengantar Bisnis, Pengantar Ekonomi Mikro/Makro
4.	2014 – sekarang	STIE Bina bangsa Banten Dosen Tetap	Mengajar di jurusan Manajemen dan Akuntansi pada semester ganjil dan genap mata kuliah Manajemen Aktiva dan Pasiva Bank, Akuntansi Keuangan Lanjutan I, Akuntansi Keuangan Lanjutan II, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Kewirausahaan dan Manajemen Keuangan Sektor Publik.
5.	2014 – sekarang	Komisaris Utama	Melakukan pengawasan, evaluasi dan memberikan arahan kepada

No.	Tahun	Nama Perusahaan	Keterangan
			Direksi dan memberikan laporan setiap bulan kepada Pemegang Saham (Pemprov. Banten)

Pelatihan dan Seminar yang Pernah Diikuti

No	Tahun	Penyelenggara	Topik dan Uraian Singkat
1.	2012	IAIN SMH Banten	Pemateri Seminar : Evaluasi Praktek Perbankan Syariah di Indonesia
2.	2014	FoSSYEI Regional Banten	Pemateri Sharia Economic Training
3.	2014	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Peserta Edukasi dan Diskusi tentang "Produk dan Jasa Keuangan"
4.	2014	IAIN SMH Banten	Peserta Seminar Internasional "Sharia Economics Fatwas Around Countries"
5.	2014	IAIN SMH Banten	Peserta Seminar Nasional "Modernisasi Filantropi Muslim Indonesia"
6.	2014	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)	Peserta Seminar Internasional "Moderasi Islam : Upaya Untuk Menangkal Radikalisme Agama"
7.	2014	Kementrian Keuangan RI Direktorat Jendral Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	Peserta acara sosialisasi "Surat Berharga Syariah Negara"
8.	2014	Lembaga Sertifikasi Propesi Manajemen Risiko (LPSMR)	Peserta Konfrensi Nasional Profesional Manajemen Risiko II/Bali
9.	2015	Lembaga Sertifikasi Propesi Manajemen Risiko (LPSMR)	Certified In Risk Governance Profesional (CRGP)
10.	2015	Lembaga Sertifikasi Propesi Manajemen Risiko (LPSMR)	Konfrensi Nasional Profesional Manajemen Risiko III/Batam
11.	2015	PT. Jamkrida Banten	Menyusun Perencanaan dan Menyusun Laporan

12.	2015	PT. Jamkrida Banten	Sebagai Narasumber program pelatihan Manajemen Risiko dan Manajemen Strategi
13.	2015	PT Jamkrida Banten	Jadilah Insan Kreatif dan Perubahan & Pribadi Kreatif
14.	12 Mei 2017	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Resiko (LSPMR)	Sertifikasi Manajemen Resiko
15.	12-13 Desember 2018	LSPMR	Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko VI
16.	09-10 April 2019	LSPMR	Certified in Risk Governance Professional

Uraian Keterampilan Yang dikuasai dan Penguasaan Bahasa Asing

No.	Jenis Keterampilan	Tingkat Penguasaan	Keterangan
1.	Perbankan	Baik	Masa Kerja 28,6 tahun
2.	Penjaminan Kredit	Baik	
3.	Bahasa Inggris	Cukup	

b. Komisaris Independen

Data Pribadi

1.	Nama	:	Master Irfan Ibrahim
2.	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
3.	Tempat/Tanggal Lahir	:	Pandeglang, 27 Juli 1988
4.	Kewarganegaraan	:	Indonesia
5.	Alamat Rumah	:	Bumi Agung Permai 1 blok G2 No.8 RT02/RW11 kel.Unyur kec.Serang Kota Serang, prov Banten
6.	Alamat Kantor	:	Jl Raya Pandeglang Km. 4 no 99, Lingk Karundang , Kel. Tembong , Kec. Cipocok Jaya Kota Serang 42126
7.	Nomor KTP/Paspor	:	3278042707880009
8.	NPWP	:	45.244.999.4-425.000
9.	Telp. Kantor/Selular	:	0254- 8487354 / 081321236921
10.	<i>Email</i>	:	indonesian.trust@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

No	Tahun	Institusi	Jurusan/ Program
1.	1999	SD N 1 Saketi	
2.	2002	SMP N 6 Tasikmalaya	
3.	2005	SMA N 1 Tasikmalaya	IPS
4.	2010	Universitas Jenderal Soedirman	S1 Manajemen

Riwayat Pekerjaan

No.	Tahun	Nama Perusahaan	Keterangan
1.	2011	Pusdiklat BRI - Program Pengembangan Staf Auditor	- Peserta Pendidikan Program Pengembangan Staff Auditor di Pusdiklat BRI
2.	Mar 2013 sd. Jun 2013	Kantor Inspeksi BRI Makassar - Junior Auditor 1	- Bertanggung jawab sebagai anggota tim audit Kantor Inspeksi BRI Makassar yang melakukan audit di Unit Kerja Operasional BRI se-Wilayah Makassar
3.	Jun 2013 sd. Jun 2015	Kantor Inspeksi BRI Makassar penugasan Kantor Cabang BRI Tual - Resident Auditor	Jabatan ini bertanggung jawab untuk menjamin efektifitas kontrol unit kerja operasional Kantor Cabang dan Unit Kerja Supervisi (KCP, KK dan BRI Unit) dalam menjalankan pengendalian intern perusahaan dan upaya mitigasi risiko.
4.	Jul 2015 sd. Des 2017	Kantor Inspeksi BRI Jakarta 2 penugasan Kantor Cabang BRI Bekasi Harapan Indah - Resident Auditor	
5.	Jan 2018 sd. Sekarang	Kantor Inspeksi BRI Jakarta 2 penugasan Kantor Cabang BRI Jakarta Fatmawati - Senior Resident Auditor	

No.	Tahun	Nama Perusahaan	Keterangan
6.	Maret 2019	Komisaris Independen	Komisaris independent berfungsi untuk memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal, memastikan pelaksanaan tugas auditor internal dan eksternal sesuai dengan standar yang berlaku termasuk memastikan pelaporan keuangan disajikan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum, melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Direksi sesuai dengan prinsip GCG.

Pelatihan dan Seminar yang Pernah Diikuti

No	Tahun	Penyelenggara	Topik dan Uraian Singkat
1.	2014	Kantor Inspeksi BRI Makassar	In-House Training Sosialisasi BRIDEX 2.0, PDE, PAI, PATSI, Implementasi Aplikasi AER dan Maintenance Server Kanins
2.	2014	Kantor Inspeksi BRI Makassar	In-House Training Quality Assurance & Sharing Session
3.	2014	Lembaga Pengembangan Fraud Audit - BRI	Pelatihan Fraud Auditing 1
4.	2016	Yayasan Pendidikan Internal Audit - BRI	Tingkat Pra Manajerial 1
5.	09 - 10 April 2019	LSPMR	Certified in Risk Governance Professional

Uraian Keterampilan Yang dikuasai dan Penguasaan Bahasa Asing

No.	Jenis Keterampilan	Tingkat Penguasaan	Keterangan
1.	Bahasa Inggris	Cukup	

Biodata singkat Dewan Pengawas Syariah, riwayat kerja dalam lima tahun terakhir, pendidikan, dan gelar profesi :

Data Pribadi

1.	Nama	:	Zaenal Abidin Syuja'i, Lc.
2.	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
3.	Tempat/Tanggal Lahir	:	Pandeglang, 17 Agustus 1955
4.	Kewarganegaraan	:	Indonesia
5.	Alamat Rumah	:	Jl KM. Idris Kubang, No. 11 RT 02/12 Cipare Kota Serang Prov. Banten
6.	Alamat Kantor	:	Jl Raya Pandeglang Km. 4 no 99, Lingk Karundang , Kel. Tembong , Kec. Cipocok Jaya Kota Serang 42126
7.	Nomor KTP/Paspor	:	3604011708550129
8.	NPWP	:	45.391.562.1-419.000
9.	Telp. Kantor/Selular	:	0254- 8487354 / 0877 7173 0049 / 0811 1225 500
10.	<i>Email</i>	:	zaenalabidin54@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

No	Tahun	Institusi	Jurusan/ Program
1.	Tahun 1974- 1977	IAIN Syarif Hidayatullah Ciputat	Fakultas Adab jurusan Sastra Arab
2.	Tahun 1977	IAIN Syarif Hidayatullah Ciputat	Fakultas Adab jurusan Sejarah Kebudayaan Islam (SKI)
3.	Tahun 1977-1981	Imam Muhammad Islamic University Riyadh Saudi Arabia	Sarjana strata satu Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir
4.	Tahun 2010	Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang	S2 Program Study Kebijakan Publik (belum selesai)

Riwayat Pekerjaan

No.	Tahun	Nama Perusahaan	Keterangan
1.	2016 s.d sekarang	Jamkrida Banten Dewan Pengawas Syariah	<p>Dewan Pengawas Syari'ah</p> <p>Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Lembaga Penjaminan terhadap fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.</p> <p>Menilai aspek Syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Lembaga Penjaminan.</p> <p>Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).</p> <p>(POJK No : 5/POJK.05/2014 BAB V pasal 5 : ayat (4))</p>

Pelatihan dan Seminar yang Pernah Diikuti

No	Tahun	Penyelenggara	Topik dan Uraian Singkat
1.	21-23 Maret 2018	BAZNAS	Rapat Kerja Nasional BAZNAS 2018
2.	2-3 November 2017	OJK	Ijtima' Sanawi Dewan Pengawas Syariah Tahun 2017
3.	04 Oktober 2017	DSN – MUI	Workshop Itjima Sanawi untuk Peningkatan Kompetensi Dewan Pengawas Syariah Penjaminan Syariah
4.	8-9 Desember 2016	OJK	Ijtima' Sanawi Dewan Pengawas Syariah Lembaga Keuangan Syariah Se-Indonesia 2016

5.	23 November 2016	Dewan Syariah Nasional (DSN)	Workshop Pra Ijtima Sanawi untuk Peningkatan Kompetensi DPS Perasuransian, Penjaminan dan Pengadaan Syariah
6.	09-11 Agustus 2016	OJK	Sertifikasi DPS Penjaminan Syariah Level Dasar
7.	10-12 Mei 2016	BAZNAS	Rapat Koordinasi Nasional BAZNAS "Strategi Kebangkitan BAZNAS 2016-2020"

Uraian Keterampilan Yang dikuasai dan Penguasaan Bahasa Asing

No.	Jenis Keterampilan	Tingkat Penguasaan	Keterangan
1.	Bahasa Inggris	Pasif	
2.	Bahasa Arab	Aktif	

Data Pribadi

1.	Nama	:	Fajri Ali
2.	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
3.	Tempat/Tanggal Lahir	:	Serang, 10 September 1967
4.	Kewarganegaraan	:	Indonesia
5.	Alamat Rumah	:	Link Pagebangan Rt. 11/03 Kelurahan Ketileng Kec. Cilegon Kota Cilegon, Prov. Banten
6.	Alamat Kantor	:	Jl Raya Pandeglang Km. 4 no 99, Lingk Karundang , Kel. Tembong , Kec. Cipocok Jaya Kota Serang 42126
7.	Nomor KTP/Paspor	:	3672021009670001
8.	NPWP	:	77.768.446.5-417.000
9.	Telp. Kantor/Selular	:	0254- 8487354 / 08777 1538 221
10.	Email	:	fajriali1967@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

No	Tahun	Institusi	Jurusan/ Program
1.	1982	SD N 6 Cilegon	-
2.	1985	Pondok Daar El Qolam, Gintung, Tangerang	-

3.	1988	Pondok Daar El Qolam, Gintung, Tangerang	-
4.	1994	IAIN Sunan Gunung Djati, Serang	S1 Fakultas Syariah
5.	2003	Universitas Budi Luhur Jakarta	S2 Ekonomi

Riwayat Pekerjaan

No.	Tahun	Nama Perusahaan	Keterangan
1.	1994 - 2002	Bank Pembiayaan Rakyat (BPR Syari'ah Baitul Muawanah, Cilegon	Direktur Utama (jabatan akhir) Menyusun perencanaan, dan mengawasi kegiatan operasional bank, mengelola Asset/non Asset, mengangkat dan memberhentikan pegawai, menyelenggarakan perencanaan, dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas direksi, serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas bagian – bagian atau unit kerja.
2.	2003 sd. 2007	Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syari'ah Cilegon Mandiri	Direktur Mengurus dan mengelola kekayaan BPRS, menetapkan struktur organisasi dan tatakerja BPRS atas pertimbangan Dewan pengawas, serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas jalannya roda organisasi.
3.	2007 sd. 2015	Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syari'ah Cilegon Mandiri	Dewan Pengawas Syari'ah Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Bank Syariah terhadap fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

No.	Tahun	Nama Perusahaan	Keterangan
			<p>Menilai aspek Syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank Syariah.</p> <p>Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).</p>
4.	2005 sd. 2015	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Al-Khairiyah Cilegon	<p>Dosen Luar Biasa</p> <p>Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat (pasal 72 UU No 14 Th 2005 tentang Guru dan Dosen)</p>
5.	2005 sd. Sekarang	Universitas Maulana Hasanudin Banten (UIN) Banten Fakultas Syariah	<p>Dosen Luar Biasa</p> <p>Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat (pasal 72 UU No 14 Th 2005 tentang Guru dan Dosen)</p>

No.	Tahun	Nama Perusahaan	Keterangan
6.	2016 sd. Sekarang	PT. Jamkrida Banten	<p>Dewan Pengawas Syari'ah</p> <p>Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Lembaga Penjaminan terhadap fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.</p> <p>Menilai aspek Syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Lembaga Penjaminan.</p> <p>Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).</p> <p>(POJK No : 5/POJK.05/2014 BAB V pasal 5 : ayat (4))</p>

Pelatihan dan Seminar yang Pernah Diikuti

No	Tahun	Penyelenggara	Topik dan Uraian Singkat
1.	13 April - 21 Juli 1988	Bank Muamalat	Sertifikasi Pendidikan Calon Pimpinan BPR Syari'ah (P2CP-BPRS)
2.	2002	Tazkia Institut	Overview Perbankan Syari'ah
3.	29 Mei – 8 Juni 2006	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)	Sertifikasi Profesi Direktur BPR Syariah
4.	2 s.d 7 September 2007	Batam, Singapore dan Malaysia	Kuliah Kerja Lapangan (KKL) STIE Al-Khairiyah
5.	27-30 Juni tahun 2010	Dewan Syariah Nasional (DSN)	Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah (DPS)
6.	19-22 Mei 2015	BAZNAS	Peserta Rapat Kerja Nasional BAZNAS

			Se-Indonesia
7.	09 – 11 Agustus tahun 2016	OJK dan DSN - MUI	Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah (DPS)
8.	2016, 2017 dan 2018	OJK dan DSN - MUI	Peserta Pra Ijtima Sanawi dan Ijtima Sanawi
9.	28 November 2018	DSN - MUI	Sertifikasi Kompetensi Pengawas Syariah

Uraian Keterampilan Yang dikuasai dan Penguasaan Bahasa Asing

No.	Jenis Keterampilan	Tingkat Penguasaan	Keterangan
1.	Bahasa Inggris	Cukup	
2.	Bahasa Arab	Cukup	

Dalam hal selama tahun pelaporan terdapat perubahan masa jabatan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS harus dicantumkan susunan keanggotaan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS sebelumnya dengan tabel sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Tanggal Pemberhentian oleh RUPS
1.	Direksi :			
	Hendra Indra Rachman	Direktur Utama	Akte Nomor : 12 tanggal 19 September 2019	
	Ahmad Rohendi	Direktur	Akte Nomor : 12 tanggal 19 September 2019	
	Didin Rasyidin Wahyu	Komisaris Utama	Akte Nomor : 12 tanggal 19 September 2019	Akte Nomor : 01 tanggal 01 Agustus 2018
	Bambang Dwi Suseno	Komisaris	Akte Nomor : 163 Tanggal 28 Februari 2017	
	T. Jaka Rooseno	Komisaris		
	Agustus– Maret 2019 :		Akte Nomor : 01 tanggal 01 Agustus 2018	
	Didin Rasyidin Wahyu	Komisaris		
	Maret 2019 :		Akte Nomor : 63 tanggal 28 Maret 2019	
	Didin Rasyidin Wahyu	Komisaris Utama	Akte Nomor : 63 tanggal 28 Maret 2019	
	Master Irfan Ibrahim	Komisaris Independen		

2. Tugas dan tanggung jawab masing-masing Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

A. Tugas dan Wewenang Direksi

Direksi wajib melakukan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan UUPT dengan tetap memperhatikan kepentingan Perseroan dan Para Pemangku Kepentingan dan wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dimaksud kepada Pemegang Saham melalui RUPS.

B. Pertanggungjawaban Direksi

- a. Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan yang memuat antara lain laporan keuangan, laporan kinerja Perseroan, laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan, laporan mengenai tugas pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau, nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta gaji dan tunjangan atau honorarium bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- b. Laporan Tahunan harus memperoleh persetujuan dari RUPS dan Laporan Keuangan harus memperoleh pengesahan dari RUPS. Dengan diberikannya persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan atas Laporan Keuangan, berarti RUPS telah memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi sejauh hal-hal tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, dengan tidak mengurangi tanggung jawab masing-masing anggota Direksi dalam hal terjadi tindak pidana atau kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang tidak dapat dipenuhi aset Perseroan;
- c. Laporan Keuangan harus telah tersedia sebelum RUPS diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar memungkinkan Pemegang Saham melakukan penilaian.

A. Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris

Dewan Komisaris wajib melakukan tugas dan wewenang antara lain melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan Perseroan, kinerja Direksi, dan memberikan nasehat kepada Direksi jika dipandang perlu untuk dan

demi kepentingan Perseroan sesuai dengan ketentuan hasil keputusan RUPS, Anggaran Dasar, dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dengan tetap memperhatikan kepentingan Pemegang Saham serta para Pemangku Kepentingan lainnya kemudian mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pengawasan dimaksud kepada RUPS.

Dewan Komisaris dapat membentuk Komite yang akan membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugasnya sesuai dengan kebutuhan Perseroan dan dengan mengacu pada keputusan RUPS, Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi sebagai pengawas dan pemberi nasehat atas pengelolaan Perseroan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya yang merupakan bagian dari Laporan Tahunan dan harus disampaikan kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan;
2. Dengan diberikannya persetujuan atas Laporan Tahunan dimaksud, berarti RUPS telah memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab masing-masing anggota Dewan Komisaris sejauh hal-hal tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, dengan tidak mengurangi tanggung jawab masing-masing anggota Dewan Komisaris dalam hal terjadi tindak pidana atau kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang tidak dapat dipenuhi aset Perseroan.

A. Tugas, wewenang dan pertanggung jawaban Dewan Pengawas Syariah

1. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Lembaga Penjaminan terhadap fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengawas Syariah.
2. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Lembaga Penjaminan
3. Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

3. Rangkap jabatan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

a. Direksi

No.	Nama	Posisi di Lembaga Penjamin	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain Dimaksud	Bidang Usaha
1.		NIHIL			

b. Dewan Komisaris

No.	Nama	Posisi di Lembaga Penjamin	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain Dimaksud	Bidang Usaha
1.		NIHIL			

c. DPS

No.	Nama	Posisi di Lembaga Penjamin	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain Dimaksud	Bidang Usaha
1.		NIHIL			

4. Pelatihan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Pelatihan yang terkait dengan peningkatan kemampuan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS dalam mencapai visi dan misi Lembaga Penjamin.

a. Direksi

No	Nama	Workshop/ training/ Seminar	Tanggal	Penyelenggara Tempat
1.	Hendra Indra Rachman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikasi Manajemen Resiko 2. Workshop pembekalan dan Penyusunan Peta Kompetensi Rancangan standar RSKKNI 3. Strategic Negotiation and Communication Training 4. Certified in Risk Governance Professional 	<p>12 Mei 2017</p> <p>01 Nov 2018</p> <p>06 Des 2018</p> <p>09 April 2019</p>	<p>LSPMR</p> <p>OJK</p> <p>FKJ</p> <p>LSPMR</p>
2	Ahmad Rohendi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan Investasi Pasar Modal 2. Sertifikasi Manajemen Resiko 3. Certified In Risk Governance Professional 4. Executive CRGP Forum 5. Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko VI 6. Certified in Risk Governance Professional 	<p>30 Maret 2017</p> <p>26-27 Sept 2017</p> <p>09 November 2017</p> <p>28 Agustus 2018</p> <p>12-13 Desember 2018</p> <p>09-10 April 2019</p>	<p>PT Bank Mandiri</p> <p>LSPMR</p> <p>LSPMR</p> <p>LSPMR</p> <p>LSPMR</p> <p>LSPMR</p>

b. Dewan Komisaris

No	Nama	Workshop/ training/ Seminar	Tanggal	Penyelenggara Tempat
1.	Didin Rasyidin Wahyu	1. Sertifikasi Manajemen Resiko	12 Mei 2017	LSPMR
		2. Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko VI	12-13 Desember 2018	LSPMR
		3. Certified in Risk Governance Professional	09 April 2019	LSPMR
2	Master Irfan Ibrahim	1. Certified in Risk Governance Professional	09-10 April 2019	LSPMR

c. Dewan Pengawas Syariah

No	Nama	Workshop/ training/ Seminar	Tanggal	Penyelenggara Tempat
1.	Fajri Ali	1. 09 – 11 Agustus tahun 2016 2. Peserta Pra Ijtima Sanawi dan Ijtima Sanawi 3. Sertifikasi Kompetensi Pengawas Syariah	09 – 11 Agustus 2016 2016, 2017 dan 2018 28 November 2018	DSN – OJK DSN – OJK DSN - MUI
2	KH. Zaenal Abidin Syuja'i	1. 09 – 11 Agustus tahun 2016 2. Peserta Pra Ijtima Sanawi dan Ijtima Sanawi 3. Serfikasi Kompetensi Pengawas Syariah	09 – 11 Agustus 2016 2016, 2017 dan 2018 Januari 2019	DSN – OJK DSN – OJK DSN - MUI

5. Pelaksanaan Kegiatan dan Rekomendasi Dewan Komisaris dan DPS

a. Dewan Komisaris

Berdasarkan beberapa indikator tingkat kesehatan perusahaan yang perlu mendapat perhatian adalah aspek operasional dengan perhatian khusus pada:

1. Gearing ratio selama periode 2018 telah tercapai 16 kali artinya Pemegang Saham harus sudah menambah modal agar direksi memiliki ruang gerak yang sangat cukup untuk meningkatkan volume penjaminan kredit dan pembiayaan kepada UMKM sehingga PT. Jamkrida Banten dapat lebih berperan mendukung program Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur terutama

merealisasikan misi ke lima. Selain itu penetrasi dan pengembangan nasabah surety bond terutama OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, serta OPD Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.

2. Apabila nilai pemeringkatan meningkat dari -BBB menjadi -A (minimal) perusahaan akan lebih agresif masuk ke bank umum baik konvensional maupun Bank Umum Syariah.
3. Manajemen biaya operasional sebaiknya dirancang melalui program internalisasi biaya pada setiap karyawan sehingga efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan dapat terus dijaga.
4. Efektivitas subrograsi yaitu rasio antara pendapatan subrograsi dibandingkan dengan beban klaim/piutang subrograsi rata-rata 0,5 persen. Hal ini memerlukan perhatian dan upaya selanjutnya agar bisa ditingkatkan melalui langkah-langkah :
 - a) Meningkatkan kompetensi SDM yang menangani subrograsi;
 - b) Ketajaman analisis saat proses penerbitan penjaminan maupun saat proses klaim;
 - c) Pengenalan tipologi nasabah melalui database yang reliabel melalui dukungan system informasi.
 - d) Program reward berupa *collecting fee* bagi pihak-pihak yang dapat meningkatkan nilai penagihan subrogasi.
5. Efektivitas subrograsi yaitu butir 4 tersebut diatas Direksi diharapkan telah memiliki profil dan peta risiko sebagai early warning dalam setiap keputusan dan proses bisnis.

Berdasarkan hal tersebut diatas pada tahun anggaran 2019, Dewan Komisaris mendorong upaya Direksi untuk :

1. Meningkatkan kegiatan usaha penjaminan kredit non bank (Koperasi dan UPDB/ Unit Pengelola Dana Bergulir, lembaga keuangan mikro), Bank Umum konvensional maupun syariah.

2. Meningkatkan kegiatan usaha penjaminan pekerjaan (*Surety Bond*), khususnya proyek-proyek yang bersumber dana dari APBN dan APBD baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
3. Meningkatkan upaya peningkatan volume dan kapasitas penjaminan kredit melalui kerjasama dengan PT Jamkrida DKI Jakarta dan/atau PT Jamkrida Jawa Barat. Sementara penjaminan bersama diluar itu perlu dipertimbangkan terkait beban biaya, risiko, dan misi pendirian PT. Jamkrida Banten untuk meningkatkan akses pendanaan UMKM di Provinsi Banten terhadap perbankan dan lembaga keuangan lainnya, sehingga dapat mendukung program Pemerintah Provinsi Banten.
4. Meningkatkan layanan penjaminan prinsip syariah agar lebih kreatif melalui bauran produk:
 - a. Penjaminan pembiayaan umum syariah dari lembaga non bank berbasis syariah.
 - b. Penjaminan pembiayaan kepemilikan emas dari perbankan syariah.
 - c. Penjaminan pembiayaan invoice financing.
 - d. Penjaminan *Custom Bond*.
 - e. Penjaminan kontra bank garansi.

Perkembangan dan Prosedur Manajemen Kepatuhan dan Manajemen Risiko

Bagi PT. Jamkrida Banten, risiko bukan merupakan hambatan untuk maju, namun merupakan loncatan disertai kehati-hatian untuk mencapai hasil yang optimal. Oleh sebab itu PT. Jamkrida Banten perlu membentuk unit pengelola manajemen risiko guna memantau kepatuhan dan profil risiko perusahaan. Pembentukan unit pengelola manajemen risiko, PT. Jamkrida Banten melakukan dengan berpedoman dan berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta *best practices*, yang dapat diterapkan dilembaga penjaminan di Indonesia, khususnya peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.05/2015 tentang penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank serta POJK No 3/POJK.05/2018 tentang Tata Kelola Perusahaan Penjaminan.

Penialain Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit serta Komite Pemantau Risiko untuk memberikan pendapat dan pandangan terhadap pengelolaan Perusahaan yang dijalankan Direksi.

Pada tahun 2018, Komite Audit telah merealisasikan seluruh program kerja yang telah disusun. Program-program yang telah dijalankan tersebut membantu tercapainya tugas dan fungsi Dewan Komisaris untuk melakukan penilaian terhadap sistem pengendalian internal perusahaan, Satuan Pengawasan Internal (SPI), auditor eksternal (KAP) dan Auditor OJK.

Sementara itu, Komite Pemantau Risiko juga telah menjalankan program kerja dengan baik dalam rangka melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap profil risiko usaha, dan monitoring tindak lanjut saran/nasihat Dewan Komisaris. Komite Pemantau Risiko melaksanakan rapat secara berkala untuk membahas kinerja Perusahaan dan memberikan saran kepada Direksi terkait profil risiko PT. Jamkrida Banten. Disamping itu, Komite Pemantau Risiko juga melakukan rapat secara periodik. Demikian pula Komite Audit secara berkala mengevaluasi proses operasional dengan standar yang telah ditetapkan melalui direksi yang membidang satuan pengawas internal agar dapat mendeteksi secara dini jika terjadi ketidakpatuhan.

b. Dewan Pengawas Syariah

Laporan Kegiatan Pengawasan

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Dewan Pengawas Syariah (DPS) telah melakukan kegiatan sesuai dengan tupoksi sebagai DPS sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja DPS tahun 2018.
2. Melakukan pemeriksaan secara periodik terhadap operasional penjaminan syariah yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa DSN.
3. Menilai dan melakukan pemeriksaan uji petik terhadap produk Penjaminan terhadap kepatuhan pada prinsip syariah, masing-masing 3 (tiga) nasabah :
 - a. Kafalah pembiayaan Produktif,
 - b. Kafalah pembiayaan Non Produktif
 - c. Kafalah Surety Bond
4. Menyampaikan Memo kepada Direksi atas pemeriksaan operasional yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap prinsip Syariah yaitu :
 - a. Memo No. 01/DPS/VII/2018 tanggal 14 Dzulqodah 1439 H/ 27 Juli 2018, pengantar opini Syariah tentang Pedoman Pemasaran Unit Usaha Syariah.
 - b. Memo, No. 02/DPS/VIII/2018 tanggal 01 Dzulhijjah 1439 H/ 13 Agustus 2018, Pengantar Opini Syariah tentang Perjanjian Kerjasama antara PT. Jamkrida Banten dengan PT. Asuransi Jasaharja Putera.
 - c. Memo, No. 03/DPS/VIII/2018 tanggal 15 Dzulhijjah 1438 H / 27 Agustus 2018 tentang *Exit Meeting* dan Tanggapan Direksi PT. Jamkrida Banten dari Hasil Pemeriksaan UUS oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
 - d. Memo, No. 04/DPS/IX/2018 tanggal 08 Muharrom 1440 H/ 18 September 2018, Pengantar Opini Syariah tentang Adendum 3 Perjanjian Kerjasama Turunan antara UUS PT. Jamkrida Banten dengan PT. Bank Jabar Banten Syariah tentang kafalah Pembiayaan Konsumtif.
 - e. Memo, No. 05/DPS/IX/2018 tanggal 08 Muharrom 1440 H/18 September 2018, Pengantar Opini Syariah No. 04/DPS/IX/2018 Adendum Kesatu Perjanjian Kerjasama antara UUS PT. Jamkrida Banten dengan PT. BPR

Syariah Muamalah Cilegon tentang Kafalah Pembiayaan Konsumtif dan Produktif.

- f. Memo, No. 06/DPS/XI/2018 tanggal 27 Safar 1440 H/05 November 2018 M tentang penguatan hubungan dengan mitra potensial.
5. Menyampaikan laporan pemeriksaan semester I kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional (DSN MUI) pada bulan Agustus 2018 dan lap semester II pada bulan Februari tahun berikutnya.
6. Membuat opini syariah sesuai dengan kebutuhan UUS yaitu :
 - a. Opini Syariah No. 01/DPS/VII/2018 tentang Pedoman Pemasaran Unit Usaha Syariah (UUS) yang dikeluarkan pada 14 Dzulqodah 1439 H/ 27 Juli 2018.
 - b. Opini Syariah No. 02/DPS/VIII/2018 tentang Perjanjian Kerjasama antara PT. Jamkrida Banten dengan PT. Asuransi Jasaharja Putera tentang Pemasaran Bersama Produk Penjaminan Syariah dan Asuransi Syariah Kendaraan Bermotor dan Asuransi Syariah Kebakaran yang dikeluarkan pada 01 Dzulhijjah 1439 H/ 13 Agustus 2018.
 - c. Opini Syariah No. 03/DPS/IX/2018 tentang Adendum 3 Perjanjian Kerjasama Turunan antara UUS PT. Jamkrida Banten dengan PT. Bank Jabar Banten Syariah tentang kafalah Pembiayaan Konsumtif yang dikeluarkan pada 08 Muharrom 1440 H/ 18 September 2018.
 - d. Opini Syariah No. 04/DPS/IX/2018 tentang Adendum Kesatu Perjanjian Kerjasama antara UUS PT. Jamkrida Banten dengan PT. BPR Syariah Muamalah Cilegon tentang Kafalah Pembiayaan Konsumtif dan Produktif yang dikeluarkan pada 08 Muharrom 1440 H/ 18 September 2018.
7. Menghadiri acara Pra Ijtima Sanawi DPS LKS Se Indoneisa yang diadakan oleh DSN MUI bekerja sama dengan OJK pada tanggal 02 Safar 1440 /11 Oktober 2018 di Kantor DSN MUI Jakarta.

8. Menghadiri acara Ijtima Sanawi DPS LKS Se Indoneisa yang diadakan oleh DSN MUI bekerja sama dengan OJK pada tanggal 8-9 November 2018 di Hotel Mercury, Ancol, Jakarta Utara.
9. Mereview dan memberikan tanggapan terhadap hasil pengawasan internal yang dilakukan oleh pengawas internal perusahaan.
10. Mengadakan rapat DPS secara berkala dan mengikuti rapat dengan pengurus Perusahaan serta RUPS.
11. Mendaftarkan diri untuk mengikuti sertifikasi profesi di bidang pengawasan Syariah yang diadakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan dinyatakan lulus.

Catatan Pemeriksaan Syariah

Dewan Pengawas Syariah telah melakukan pemeriksaan syariah terhadap operasional UUS PT. Jamkrida Banten dengan beberapa catatan :

- a. Kegiatan Kafalah Produktif, Non Produktif dan Surety Bond terkait pemenuhan prinsip syariah, DPS berpendapat terhadap catatan dari hasil pemeriksaan, yaitu:
 1. Penggunaan istilah debitur untuk penerima pembiayaan dari *Makful Lahu* masih tertera, seharusnya diganti dengan nasabah pembiayaan, hal ini perlu menjadi catatan.
 2. Istilah kredit dalam akad/ sertifikat kafalah masih saja tertera, sebaiknya diganti dengan menggunakan istilah pembiayaan, hal ini perlu menjadi catatan.
 3. Dalam ketentuan umum kafalah, penggunaan istilah pinjaman sebaiknya juga diganti dengan pembiayaan
 4. Dalam lampiran sertifikat kafalah pembiayaan mikro, pencantuman suku bunga bank pada kolom 11, sudah diganti dengan *equivalen* (setara) dg bagi hasil/margin
 5. Dalam *Surety Bond* sertifikat Kafalah Uang Muka, Kafalah Pelaksanaan, dan Kafalah Pemeliharaan tanda tangan Makful Anhu belum ada, seharusnya sertifikat tersebut ditandatangani oleh Makful Anhu.
- b. Berkaitan dengan Perhitungan dan pencatatan transaksi keuangan Unit Usaha Syariah (UUS) PT Jamkrida Banten, DPS berpendapat :
 1. Istilah konvensional dalam laporan keuangan UUS pada periode laporan semester II tahun 2018 telah diganti dengan istilah syariah, walau masih ada beberapa yang belum diganti.
 2. Masih terdapat Istilah *Imbal Jasa Penjaminan* dalam laporan keuangan, sebaiknya diganti dengan *Imbal Jasa Kafalah*, sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa DSN.
 3. Istilah tingkat suku bunga dalam laporan keuangan telah diganti dengan *equivalen* (setara) dg bagi hasil/margin sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa DSN.

4. Dalam Laporan posisi Keuangan Laba Rugi, terdapat bagi hasil dari Makful Lahu (LKS) yang antara bulan berjalan dengan bulan lalu masih sama nominalnya. Hal ini dikhawatirkan adanya kesamaan dengan suku bunga yang sudah tetap.
 5. Penjelasan Asset Lancar, terdapat rincian Bank, yang menyebutkan Giro Bank dan Mudharabah PT. BPRS, juga telah diganti dengan Giro Wadi'ah dan Tabungan Mudharabah PT. BPRS.
 6. Penjelasan Asset Lancar, terdapat rincian Investasi Lancar, yang menyebutkan Deposito PT. BPRS dan BUS, juga telah diganti dengan Deposito Mudharabah PT. BPRS dan Deposito Mudharabah BUS.
 7. Penjelasan Pendapatan, terdapat pendapatan bagi hasil; Pend. Bagi Hasil Giro BUS dan Pend. Bagi Hasil Jasa Mudharabah PT. BPRS, telah diganti dengan Pend. Bonus Giro Wadi'ah BUS dan Pend. Bagi Hasil Tabungan Mudharabah PT. BPRS
 8. Penjelasan Pendapatan, terdapat pendapatan investasi; Pend. Bagi Hasil Deposito BUS dan PT. BPRS, telah diganti Pend. Bagi Hasil Deposito Mudharabah BUS dan PT. BPRS.
- c. Berkaitan dengan berkas klaim istilah konvensional, seperti kredit, angsuran bunga, telah diganti dengan pembiayaan dan angsuran margin.

6. Pelaksanaan Tugas Komisaris Independen

Komisaris Independen baru diangkat pada tanggal 28 Maret 2019, sehingga untuk laporan GCG tahun 2018 belum bisa dilaporkan.

7. Frekuensi rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris, dan rapat DPS yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun

a. Rapat Direksi

Di perusahaan kami rapat Direksi dilaksanakan setiap seminggu sekali di awal pekan yaitu rapat yang beragendakan evaluasi dan perencanaan mingguan dari setiap divisi yang dihadiri oleh seluruh karyawan. Dalam satu tahun kurang lebih rapat diadakan sebanyak 45 kali pertemuan rapat. Selain rapat direksi dengan seluruh karyawan, rapat Direksi dengan pengurus perusahaan lainnya juga diadakan setiap ada masalah yang memang harus dibahas.

No.	Nama	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
		Fisik	Sarana Media Elektronik	
1.	Hendra Indra Rachman	V	-	100 %
2.	Ahmad Rohendi	V	-	100 %

b. Rapat Dewan Komisaris

Rapat internal Dewan Komisaris dalam setahun dilaksanakan sebanyak 8 kali pertemuan, selain itu Dewan Komisaris juga melakukan rapat dengan pengurus perusahaan lainnya yaitu Direksi dan Dewan Pengawas Syariah dengan tujuan membahas masalah-masalah perusahaan yang dianggap penting untuk dibahas.

No.	Nama	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
		Fisik	Sarana Media Elektronik	
1.	Didin Rasyidin Wahyu	v	-	100 %
2.	Bambang Dwi Suseno	V	-	100% (Jan s.d Juli 2018)
3.	Takro Jaka Rooseno	V	-	100 % (Jan s.d Juli 2018)

c. Rapat DPS

Dewan Pengawas Syariah dalam setahun telah melakukan rapat intern sebanyak empat (4) kali. Selibhnya rapat yang diikuti adalah rapat Internal Perusahaan dengan Direksi maupun Dewan Komisaris dalam pembahasan hal-hal tertentu seputar *issue* perusahaan.

No.	Nama	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
		Fisik	Sarana Media Elektronik	
1.	H Fajri Ali	V	-	100 %
2.	KH. Zaenal Abidin Syujai'i	V	-	100%

Berikut rekap Rapat yang telah dilaksanakan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah selama 1 (satu) tahun :

a. Rapat direksi dengan Karyawan

NO	NAMA	TANGGAL	PEMBAHASAN
1	Meeting Mingguan	02/01/2018	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
2	Meeting Mingguan	08/01/2018	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
3	Meeting Mingguan	15/01/2018	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
4	Meeting Mingguan	22/01/2018	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
5	Meeting Mingguan	29/01/2018	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
6	Meeting Mingguan	05/02/2018	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
7	Meeting Mingguan	12/02/2018	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
8	Meeting Mingguan	19/02/2018	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
9	Meeting Mingguan	05/03/2018	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan

10	Meeting Mingguan	12/03/2018	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
11	Meeting Mingguan	26/03/2018	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
12	Meeting Mingguan	02/04/2018	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
13	Meeting Mingguan	09/04/2018	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
14	Meeting Mingguan	16/04/2018	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
15	Meeting Mingguan	23/04/2018	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
16	Meeting Mingguan	07/05/2018	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
17	Meeting Mingguan	14/05/2018	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
18	Meeting Mingguan	21/05/2018	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
19	Meeting Mingguan	28/05/2018	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
20	Meeting Mingguan	04/06/2018	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
21	Meeting Mingguan	25/06/2018	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
22	Meeting Mingguan	02/07/2017	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
23	Meeting Mingguan	09/07/2017	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
24	Meeting Mingguan	16/07/2017	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
25	Meeting Mingguan	23/07/2017	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
26	Meeting Mingguan	06/08/2017	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
27	Meeting Mingguan	13/08/2017	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
28	Meeting Mingguan	20/08/2017	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
29	Meeting Mingguan	27/08/2017	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
30	Meeting Mingguan	03/09/2017	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
31	Meeting Mingguan	17/09/2017	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
32	Meeting Mingguan	10/09/2017	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
33	Meeting Mingguan	01/10/2010	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
34	Meeting Mingguan	08/10/2017	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
35	Meeting Mingguan	15/10/2017	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
36	Meeting Mingguan	22/10/2017	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
37	Meeting Mingguan	29/10/2017	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
38	Meeting Mingguan	05/11/2017	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
39	Meeting Mingguan	12/11/2017	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
40	Meeting Mingguan	19/11/2017	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
41	Meeting Mingguan	26/11/2017	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
42	Meeting Mingguan	03/12/2018	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
43	Meeting Mingguan	10/12/2018	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
44	Meeting Mingguan	17/12/2018	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
45	Meeting Mingguan	31/12/2018	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan

b. Rapat Direksi dengan Pengurus Perusahaan Lainnya (Dekom & DPS)

NO	NAMA	TANGGAL	PEMBAHASAN
1	Rapat Dirkom & DPS	04/03/2018	Sertifikasi DPS
2	Rapat Dirkom & DPS	02/10/2018	Kick Off RKAP 2019
3	Rapat Dirkom & DPS	12/11/2018	RKAP 2019

c. Rapat Dewan Komisaris

NO	NAMA	TANGGAL	PEMBAHASAN
1	Rapat Dekom-Komite Nominasi & Remunerasi	12/01/2018	Pembahasan Nota Dinas dari Direksi
2	Rapat Komdir	14/02/2018	Pelaporan GCG Tahun 2017
3	Rapat Intern komisaris	11/04/2018	Komisaris Independen
4	Rapat Intern komisaris	13/04/2018	Tindak Lanjut hasil temuan OJK tentang penunjukan KAP
5	Rapat Komdir	16/05/2018	Pembahasan LHPS
6	Rapat Intern Komisaris	01/07/2018	Komisaris Independen
7	Rapat Komdir	07/08/2018	Pembahasan Setoran Modal
8	Rapat Komdir	05/09/2018	Pembahasan Hasil temuan Inspektorat

B. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas:

- 1) komite audit bagi Lembaga Penjamin yang memiliki lingkup wilayah operasional nasional atau provinsi, atau terdapat kepemilikan asing; atau
- 2) fungsi yang membantu Dewan Komisaris bagi Lembaga Penjamin yang memiliki lingkup wilayah operasional kabupaten,

Komite dibawah Dewan Komisaris terdiri dari 3 komite , yaitu :

- Komite Audit
- Komite Pemantau Risiko
- Komite Nominasi dan Remunerasi

a. Komite Audit

Dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal, terdiri atas:

1. Struktur, keanggotaan, dan keahlian komite audit

Komite audit diketuai oleh Didin Rasyidin Wahyu (Komisaris Utama) dengan

anggota sebagai berikut :

- Bambang Dwi Suseno (Komisaris)
- Takro Jaka Rooseno (Komisaris)
- Enjum Jumhana (Satuan Pengawas Internal)

2. Tugas dan tanggung jawab komite audit

- a. Mengawasi sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan eksternal.
- b. Memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris.
- c. Mediator antara Auditor Eksternal, Jajaran Manajemen, Auditor Internal dan Dewan Komisaris guna membahas temuan hasil audit dan permasalahan lainnya.
- d. Sebagai quality assurance dengan cara mengawasi kegiatan para auditor untuk mencegah terjadinya pekerjaan audit yang rendah mutunya.
- e. Melakukan monitoring proses perbaikan yang berkesinambungan atas kebijakan, prosedur dan praktek pada semua tingkatan di Perusahaan guna memastikan telah dilakukannya pengelolaan dan pengendalian Perusahaan dengan baik.

3. Frekuensi rapat komite audit/fungsi yang membantu Dewan Komisaris

No.	Nama Anggota Komite / fungsi yang membantu Dewan Komisaris	Rapat Komite audit/fungsi yang membantu Dewan Komisaris	
		Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
1.	Didin Rasyidin Wahyu		100 %
2.	Bambang Dwi Suseno		100 %
3.	Takro Jaka Rooseno		100 %
4.	Enjum Jumhana		100 %

4. Program kerja komite audit/fungsi yang membantu Dewan Komisaris dan realisasinya

Komite Audit akan merealisasikan Program Kerja Komite Audit periode tahun 2018, yang melingkupi Penelaahan Atas Informasi Keuangan; Penelaahan Efektivitas Pengendalian Intern; Pelaporan Risiko Dan Pelaksanaan Manajemen Risiko; Evaluasi Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Internal Audit; Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundangan; *self assessment* pelaksanaan tugas Komite Audit; dan penyampaian laporan tertulis kepada Dewan Komisaris perihal saran perbaikan pengawasan dan pengendalian intern dan atau perihal penugasan khusus yang diantaranya Rapat Intern Komite Audit.

Menyampaikan Risalah Rapat Intern Komite Audit, menyampaikan laporan kegiatan Komite Audit; Penyampaian laporan tahunan tahun 2018 pelaksanaan kegiatan Komite; Penyusunan laporan Komite Audit; Penyusunan rencana kerja Komite Audit 2019; Review piagam Komite Audit; dan Partisipasi dalam seminar/*workshop/training* Audit dan perkembangan peraturan peraturan baru (anggota Komite).

5. Struktur komite lainnya.

b. Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi diketuai oleh Takro Jaka Rooseno (Komisari) dengan anggota sebagai berikut :

- Didin Rasyidin Wahyu (Komisaris Utama)
- Bambang Dwi Suseno (Komisaris)
- Asep Wahyu Mulyana (Kepala Divisi SDMU)
- Rasmin (Kepala Divisi AKSI)

Uraian Singkat Tentang Ketentuan Komite Nominasi dan Remunerasi :

1. Komite Nominasi dan Remunerasi adalah Komite Dewan Komisaris Perusahaan yang dibentuk untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 /POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017.

2. Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi secara terpisah.
3. Pengangkatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dari pejabat eksekutif dilakukan oleh Direksi berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris.
4. Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari 4 (empat) orang anggota yaitu 1 (satu) orang Komisaris Independen merangkap sebagai Ketua, 2 (dua) orang Komisaris dan 1 (satu) orang pejabat eksekutif pada perseroan yang membawahi Sumber Daya Manusia.
5. Komite Nominasi dan Remunerasi diketuai Komisaris Independen. Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi hanya diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya pada perseroan.
6. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilarang berasal dari anggota Direksi.

c. Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Bambang Dwi Suseno (Komisari) dengan anggota sebagai berikut :

- Didin Rasyidin Wahyu (Komisaris Utama)
- Takro Jaka Rooseno (Komisaris)
- Rachmat Rolly Suyono (Kepala Divisi Teknik Penjaminan)
- Rosalinda (Kepala Bagian Manajemen Risiko, Legal dan Subrogasi)

1. Komite Pemantau Risiko membantu Dewan Komisaris melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris dalam penerapan prinsip-prinsip (Tata Kelola Yang Baik) *Good Corporate Governance* khususnya yang berkaitan dengan bidang manajemen risiko
2. Komite Pemantau Risiko dibentuk berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris dan didudukkan dalam suatu Surat Keputusan Dewan Komisaris.

3. Komite Pemantau Risiko berada di bawah koordinasi Dewan Komisaris dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.
 4. Komite Pemantau Risiko bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggungjawab langsung kepada Dewan Komisaris.
6. Program kerja terkait tugas dan tanggung jawab komite lainnya Komite Nominasi dan Remunerasi

Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi :

Melakukan evaluasi serta menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem/kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Komisaris, Direksi, pejabat eksekutif secara menyeluruh.

- Fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi :

Fungsi Nominasi:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait:
 - a. Komposisi dan proses nominasi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris
 - b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi
 - c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan evaluasi kinerja Direksi dan/atau Dewan Komisaris
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggotan Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris.
4. Melakukan telaah dan memberikan usulan calon yang memenuhi syarat untuk disampaikan ke RUPS

Fungsi Remunerasi:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai
 - a. Struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
 - b. Kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris

- c. Besaran Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
- 2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja
- Komite Pemantau Risiko

Tugas dan Tanggungjawab :

- Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko bank dan kebijakan manajemen risiko terintegrasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kesesuaian kebijakan manajemen risiko dan manajemen risiko terintegrasi dengan implementasinya untuk memastikan bahwa PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN telah mengelola risiko-risiko secara memadai.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - Pelaksanaan rencana kerja dan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko;
 - Pelaksanaan rencana kerja dan tugas Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi. untuk selanjutnya memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris guna peningkatan efektivitas pelaksanaan manajemen risiko pada PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN.
- Melakukan evaluasi atas kebijakan dan strategi manajemen risiko, manajemen risiko terintegrasi dan kebijakan lain terkait risiko yang disusun Direksi secara berkala, serta memberikan saran dan masukan kepada Dewan Komisaris atas kebijakan Bank yang ditetapkan Direksi dalam bidang manajemen risiko.
- Melaksanakan tugas sesuai dengan program/rencana kerja Komite Pemantau Risiko.
- Memberikan hasil evaluasi terhadap tanggapan-tanggapan (penilaian) regulator terkait risiko kepada Dewan Komisaris.
- Mengidentifikasi dan mengevaluasi kecukupan kebijakan Bank dalam bidang pelaksanaan manajemen risiko

- Melakukan kajian terhadap fungsi dan efektivitas Komite Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi, serta melakukan koordinasi atas pelaksanaan dan pengawasan efektivitas masing-masing komponen dari *Enterprise Risk Management* PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN.
- Melakukan penelaahan dan memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris atas keputusan Direksi untuk pemberian fasilitas kredit dalam jumlah tertentu yang wajib dikonsultasikan kepada Dewan Komisaris.
- Melakukan penelaahan, memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris apabila diperlukan atas keputusan Direksi mengenai pemberian kredit kepada pihak terkait yang berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
- Melakukan Monitoring dan memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris atas Laporan perkembangan pelaksanaan pemberian kredit dalam jumlah tertentu yang telah dikonsultasikan kepada Dewan Komisaris.
- Melakukan penelaahan dan memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris atas Kebijakan Umum Perkreditan yang disampaikan Direksi untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
- Melakukan penelaahan serta memberikan pendapat atau rekomendasi kepada Dewan komisaris apabila diperlukan terhadap laporan, usulan/permintaan persetujuan atau hal-hal lain terkait dengan risiko yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris.
- Melakukan kunjungan ke lapangan dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko apabila diperlukan.
- Melaksanakan tugas-tugas tertentu lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

C. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal

1. Fungsi kepatuhan

a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan

Anggota Direksi yang membawahi langsung fungsi kepatuhan dalam hal ini adalah Direktur Utama. Sementara Direktur membawahi Audit Internal perusahaan (SPI) Satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan. Pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

b. Satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan

Satuan Pengawas Internal (SPI)

c. Pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Tugas SPI

Tugas Satuan Pengawas Internal

1. Membantu Direksi dalam bidang pengawasan dan monitoring atas kegiatan yang dijalankan oleh perusahaan secara periodik;
2. Menyusun rencana kerja pengawasan dan pemeriksaan;
3. Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap seluruh kegiatan perusahaan.

d. Tingkat kesehatan keuangan Lembaga Penjamin

Perusahaan telah melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Keuangan Lembaga Penjamin yang mengacu pada SE OJK NOMOR 18 /SEOJK.05/2018 tgl.18-12-2018 dan pemantauan dilakukan setiap bulannya. (Lampiran tingkat kesehatan)

e. Kepemilikan unit kerja atau fungsi dalam menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan konsumen

No.	Penanggung Jawab	Pimpinan Unit Kerja/Pelaksana Fungsi
1	R Roly Suyono	Divisi Teknik Penjaminan

2. Fungsi auditor internal

Efektivitas dan cakupan pelaksanaan tugas auditor internal dalam menilai seluruh aspek dan unsur kegiatan.

a. Ruang lingkup pekerjaan audit.

Ruang Lingkup Auditor Internal. adalah “Audit internal secara umum memiliki tujuan untuk membantu Direktur Utama dalam menjalankan kegiatandan tanggungjawabnya secara efektif, dengan memberikan analisis, penilaian, saran dan komentar yang objektif mengenai kegiatan atau hal-hal yang diperiksa.”

Pada dasarnya tujuan dari audit internal adalah membantu manajemen di dalam suatu Perusahaan untuk menjalankan tugas dan wewenangnya secara sistematis, efektif dan efisien dengan cara memberikan analisis, penilaian, rekomendasi, konsultasi dan informasi sehubungan dengan aktivitas kegiatan yang diperiksanya.

Ruang lingkup audit internal adalah : sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan auditor internal terhadap kegiatan operasional dan kontrol yang berbeda-beda dalam perusahaan untuk menentukan apakah (1) informasi keuangan dan kegiatan operasional telah dilakukan sesuai dan dapat diandalkan serta dipertanggungjawabkan; (2) risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisasi; (3) peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa diterima telah diikuti; (4) kriteria kegiatan operasional yang memuaskan telah dipenuhi; (5) sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis; dan (6) tujuan perusahaan telah dicapai secara efektif-semua dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu para divisi dalam menjalankan tanggungjawabnya secara efektif.”

Bahwa untuk mencapai keseluruhan tujuan tersebut, maka Satuan Pengawas Internal /auditor internal harus melakukan beberapa aktivitas (Ruang lingkup audit internal) yaitu sebagai berikut :

1. Memeriksa dan menilai baik buruknya pengendalian atas kegiatan akuntansi keuangan dan kegiatan operasional lainnya.
2. Memeriksa sampai sejauh mana hubungan para divisi terhadap kebijakan, rencana dan prosedur yang telah ditetapkan.

3. Memeriksa sampai sejauh mana aktiva perusahaan dipertanggung jawabkan dan dijaga dari berbagai macam bentuk kerugian.
4. Memeriksa kecermatan pembukuan dan data lainnya yang dihasilkan oleh perusahaan.
5. Menilai prestasi kerja para pejabat/ pelaksana dalam menyelesaikan tanggung jawab yang telah ditugaskan.”

Di perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Banten, aktivitas dari audit internal / monitoring yang disebutkan diatas digolongkan kedalam empat macam Aspek diantaranya:

1. Aspek Kelembagaan;
2. Aspek Keuangan;
3. Aspek Penyelenggaraan Usaha;
4. Aspek Tata Kelola Perusahaan yang Baik
5. Aspek Lainnya

b. Struktur atau kedudukan satuan kerja audit internal

Ruang lingkup Satuan Pengawasan Internal tersebut haruslah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya guna membantu pihak manajemen dalam mengawasi dan mengevaluasi berjalannya rencana kerja perusahaan.

Kedudukan satuan Pengawas Internal bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

c. Independensi auditor internal

Didefinisikan sebagai kewenangan yang diberikan oleh manajemen kepada pengawas internal agar dapat melaksanakan tugasnya secara efektif. Pengawas internal harus independen atau terpisah dari berbagai aktivitas yang diperiksa. Independensi memungkinkan pengawas internal untuk memberikan berbagai penilaian yang tidak memihak dan tanpa prasangka, yang sangat penting bagi pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana mestinya. Hal tersebut dapat dicapai melalui status organisasional dan keobjektifan. Di perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Banten , Satuan Pengawas Intern merupakan bagian internal audit yang

mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan sistem pengendalian kegiatan dibawah Direktur Utama.

Perusahaan perlu membangun dan mengembangkan fungsi audit internal yang independen dibekali dengan sumber daya yang memadai dan staf yang kompeten, pengendalian internal yang independen merupakan suplemen untuk memperkuat efektivitas pengendalian internalnya. Independent dalam hal ini adalah independensi Satuan Pengawasan Intern (SPI) Perusahaan BUMD yang terdiri dari independensi status perusahaan, kebebasan perencanaan pemeriksaan, kebebasan pelaksanaan pemeriksaan, dan kebebasan pelaporan hasil pemeriksaan sedangkan efektivitas pengendalian internal. Independensi merupakan salah satu komponen etika yang harus dijaga oleh satuan pengawas internal. Independensi berarti bahwa auditor harus jujur, tidak mudah dipengaruhi dan tidak memihak kepentingan siapapun, karena auditor tersebut melakukan pekerjaannya untuk kepentingan perusahaan, SPI berkewajiban untuk jujur tidak hanya pada manajemen dan pimpinan dalam perusahaan, namun juga kepada pihak lain yang meletakkan kepercayaan pada pekerjaan tersebut.

Sikap mental independen tersebut meliputi independen dalam fakta (in fact) maupun independen dalam penampilan (in appearance).

1. Independen dalam fakta adalah independen dalam diri auditor, yaitu kemampuan auditor untuk bersikap bebas, jujur, dan objektif dalam melakukan penugasan audit. Hal ini berarti bahwa auditor harus memiliki kejujuran yang tidak memihak dalam menyatakan pendapatnya dan dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang dipakai sebagai dasar pemberian independen dalam fakta atau independen dalam kenyataan harus memelihara kebebasan sikap dan jujur.
2. Sedangkan independen dalam penampilan adalah independen yang dipandang dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap yang di audit.

Auditor akan dianggap tidak independen apabila auditor tersebut mempunyai hubungan tertentu (misalnya hubungan keluarga, hubungan keuangan) dengan auditee yang dapat menimbulkan kecurigaan bahwa auditor tersebut akan memihak atau tidak independen. Oleh karena itu, auditor tidak hanya harus bersikap bebas menurut faktanya, tapi juga harus menghindari keadaan-keadaan yang membuat orang lain meragukan kebebasannya

- d. Uraian tugas satuan kerja audit internal
 - a. Membantu Direksi dalam bidang pengawasan dan monitoring atas kegiatan yang dijalankan oleh perusahaan;
 - b. Menyusun rencana kerja pengawasan dan pemeriksaan;
 - c. Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap seluruh kegiatan perusahaan;
 - d. Melaksanakan pemeriksaan khusus atas perintah direksi.
 - e. Menyusun laporan hasil pengawasan dan pemeriksaan internal dan memberikan saran perbaikannya serta memantau tindak lanjut hasil temuan.
 - f. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian manajemen di tiap divisi.
 - g. Melakukan koordinasi pelaksanaan audit dengan auditor eksternal dan Komite Audit sesuai dengan standar audit dan kode etik masing-masing, sehingga tujuan audit semua pihak tercapai.

e. Profil kepala satuan kerja audit internal

Nama : Sugiarto Munandar

Jabatan : Pengawas Madya Satuan Pengfawas Internal

Pendidikan : S1

Pengalaman Kerja : Bekerja di BRI dari Tahun 1991 – 2013

Pelatihan Yang Pernah diikuti :

1. Pelatihan Pengetahuan Produk Penjaminan Suraty Bond dan Bank Ganasi
2. Menyusun Perencanaan dan Pelaporan
3. Pelatihan Penjaminan Syariah dan Pelaporan Keuangan Syariah

4. Managemen Resiko dan Managemen Strategi
 5. Insan Kreatif
 6. Perpajakan
 7. Peningkatan mutu sumber daya manusia
 8. Public Speaking, Public Relation dan service excellent
 9. Imbal Jasa Penjaminan/Kafalah
 10. Pelatihan Audit Internal
 11. Key Performance Indikator (KPI)
 12. CRMO
- f. Jumlah pegawai pada satuan kerja audit internal : 1 (satu) orang
- g. Laporan hasil pelaksanaan tugas audit internal

Report Hasil Monitoring Internal

1. Divisi Akuntansi dan Investasi

NO	RUANG LINGKUP	KONDISI SAAT INI	TEMUAN	SARAN
1				
1	Persediaan ATK / Form2	RKAP-P 2018	Pencatatan masih digabungkan.	Untuk memudahkan dan keterbukaan informasi / kejelasan tanggung jawab dan kedudukan agar dipasang Daftar Struktur Organisasi lengkap dengan Nama dan Jabatan.
2	Aset / Inventaris Kantor	POJK NOMOR 3/POJK.05/2017 Tentang Tata kelola Perusahaan yang baik bagi Lembaga penjamin bab Keterbukaan Informasi	Pencatatan keuangan masih manual atas Pendapatan IJP Bank/Lembaga	Agar dibuatkan usulan update Sistem Informasi dalam pengembangan sistem sehingga lebih meminimalisir kesalahan dan selisih serta memudahkan informasi dan analisa.
Aspek Penyelenggaraan Usaha				
1	Pencatatan secara Sistem	POJK NOMOR 3/POJK.05/2017 Tentang Tata kelola Perusahaan yang baik bagi Lembaga penjamin bab Keterbukaan Informasi	Pencatatan keuangan masih manual atas Pendapatan IJP Bank/Lembaga	Agar dibuatkan usulan update Sistem Informasi dalam pengembangan sistem sehingga lebih meminimalisir kesalahan dan selisih serta memudahkan informasi dan analisa.
Aspek Tata Kelola Perusahaan yang Baik				
3	Aset- Aset Kantor	SOP No.06/POS/SDMU/VIII/2018 tanggal 02-08-2018 tentang Inventarisasi dan	Belum dicantumkan cara penghapusan asset.	Mengingat Aset sudah mulai ada yang rusak dan tidak dapat diperbaiki, SOP agar di review dan ditambahkan cara menghapus Aset Perusahaan baik

NO	RUANG LINGKUP	KONDISI SAAT INI	TEMUAN	SARAN																														
		pemeliharaan Aset Perusahaan		karena Rusak dan tidak dapat diservice, Aset Hilang ataupun sudah habis masa penyusutannya dan sudah tidak mempunyai manfaat pakai.																														
Aspek Tata Kelola Perusahaan yang Baik																																		
1	Investasi	SK Direksi No.007/SK/DIR/III/2017 tgl.15-03-2017 tentang Sistim Manajemen Kas dan Investasi	BAB IV PEDOMAN INVESTASI F. Kewenangan Dan Tata Cara Pengelolaan Investasi 1.2 Kewenangan Pelaksanaan Investasi a. <i>Deposito/deposit on call.</i> - Penempatan deposito / <i>deposit on call</i> sampai dengan jumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) merupakan kewenangan Direktur; - Penempatan deposito / <i>deposit on call</i> dengan jumlah lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai dengan jumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) merupakan kewenangan Direktur Utama. -Penempatan deposito / <i>deposit on call</i> dengan jumlah lebih dari	Agar lebih jelas lagi mengenai point tersebut, Apakah total Eksposur atau per Denominasi bilyet. mengingat Posisi November 2018 (Konven) Rp.25.150.000.000,- terdiri dari : <table border="1" data-bbox="1077 784 1540 2027"> <tbody> <tr> <td>PD BPR LPK Parung Panjang</td> <td>100,000,000</td> </tr> <tr> <td>BPR SYARIAH CILEGON MANDIRI</td> <td>100,000,000</td> </tr> <tr> <td>BPR Citra Artha Sedaya</td> <td>150,000,000</td> </tr> <tr> <td>BPR Akasia Mas</td> <td>300,000,000</td> </tr> <tr> <td>BPR Nusantara Bona Pasogit</td> <td>400,000,000</td> </tr> <tr> <td>BPR Pima Kredit Mandiri</td> <td>450,000,000</td> </tr> <tr> <td>BPR LPK Warung Gunung</td> <td>600,000,000</td> </tr> <tr> <td>BPR Lambang Ganda</td> <td>950,000,000</td> </tr> <tr> <td>Bank Bukopin</td> <td>1,000,000,000</td> </tr> <tr> <td>BPR Mahkota Artha Sedaya</td> <td>1,050,000,000</td> </tr> <tr> <td>BPR Darbeny Rizki</td> <td>1,200,000,000</td> </tr> <tr> <td>BPR Bintang Ekonomi Sejahtera</td> <td>1,350,000,000</td> </tr> <tr> <td>BPR Laksana Bina Cilegon</td> <td>1,350,000,000</td> </tr> <tr> <td>BPR Amal Bhakti Sejahtera</td> <td>1,925,000,000</td> </tr> <tr> <td>BPR Kerta Raharja</td> <td>2,550,000,000</td> </tr> </tbody> </table>	PD BPR LPK Parung Panjang	100,000,000	BPR SYARIAH CILEGON MANDIRI	100,000,000	BPR Citra Artha Sedaya	150,000,000	BPR Akasia Mas	300,000,000	BPR Nusantara Bona Pasogit	400,000,000	BPR Pima Kredit Mandiri	450,000,000	BPR LPK Warung Gunung	600,000,000	BPR Lambang Ganda	950,000,000	Bank Bukopin	1,000,000,000	BPR Mahkota Artha Sedaya	1,050,000,000	BPR Darbeny Rizki	1,200,000,000	BPR Bintang Ekonomi Sejahtera	1,350,000,000	BPR Laksana Bina Cilegon	1,350,000,000	BPR Amal Bhakti Sejahtera	1,925,000,000	BPR Kerta Raharja	2,550,000,000
PD BPR LPK Parung Panjang	100,000,000																																	
BPR SYARIAH CILEGON MANDIRI	100,000,000																																	
BPR Citra Artha Sedaya	150,000,000																																	
BPR Akasia Mas	300,000,000																																	
BPR Nusantara Bona Pasogit	400,000,000																																	
BPR Pima Kredit Mandiri	450,000,000																																	
BPR LPK Warung Gunung	600,000,000																																	
BPR Lambang Ganda	950,000,000																																	
Bank Bukopin	1,000,000,000																																	
BPR Mahkota Artha Sedaya	1,050,000,000																																	
BPR Darbeny Rizki	1,200,000,000																																	
BPR Bintang Ekonomi Sejahtera	1,350,000,000																																	
BPR Laksana Bina Cilegon	1,350,000,000																																	
BPR Amal Bhakti Sejahtera	1,925,000,000																																	
BPR Kerta Raharja	2,550,000,000																																	

NO	RUANG LINGKUP	KONDISI SAAT INI	TEMUAN	SARAN																															
			<p>Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) diputuskan melalui komite investasi.</p> <p>c. Lain-Lain Deposito dengan nominal relatif kecil dan mempunyai tanggal jatuh tempo yang sama/mendekati, dalam rangka meminimalkan jumlah bilyet dan memudahkan monitoring agar dilakukan penggabungan deposito;</p>	<table border="1"> <tr> <td>BPR Berkah</td> <td>2,700,000,000</td> </tr> <tr> <td>BPR Serang</td> <td>3,500,000,000</td> </tr> <tr> <td>BANK Banten</td> <td>9,900,000,000</td> </tr> <tr> <td>Bank BJB Syariah</td> <td>10,000,000,000</td> </tr> </table>	BPR Berkah	2,700,000,000	BPR Serang	3,500,000,000	BANK Banten	9,900,000,000	Bank BJB Syariah	10,000,000,000																							
BPR Berkah	2,700,000,000																																		
BPR Serang	3,500,000,000																																		
BANK Banten	9,900,000,000																																		
Bank BJB Syariah	10,000,000,000																																		
				<p>Sebaiknya adalah menggunakan total eksposur per Lembaga Keuangan mengingat risiko yang akan dihadapi.</p> <p>Masih adanya penempatan deposito dibawah 100 jt atau nominatifnya relatif kecil dan lebih dari satu bilyet pada satu uker bank :</p> <table border="1"> <tr> <td>BPR Amal Bhakti Sejahtera</td> <td>50,000,000</td> </tr> <tr> <td>BPR Amal Bhakti Sejahtera</td> <td>50,000,000</td> </tr> <tr> <td>BPR Amal Bhakti Sejahtera</td> <td>50,000,000</td> </tr> <tr> <td>BPR Berkah</td> <td>50,000,000</td> </tr> <tr> <td>BPR Kerta Raharja</td> <td>50,000,000</td> </tr> <tr> <td>BPR Laksana Bina Cilegon</td> <td>50,000,000</td> </tr> <tr> <td>Bank Banten Cabang Ciputat</td> <td>50,000,000</td> </tr> <tr> <td>Bank Banten Cabang Balaraja</td> <td>50,000,000</td> </tr> <tr> <td>Bank Banten</td> <td></td> </tr> </table>		BPR Amal Bhakti Sejahtera	50,000,000	BPR Amal Bhakti Sejahtera	50,000,000	BPR Amal Bhakti Sejahtera	50,000,000	BPR Berkah	50,000,000	BPR Kerta Raharja	50,000,000	BPR Laksana Bina Cilegon	50,000,000	Bank Banten Cabang Ciputat	50,000,000	Bank Banten Cabang Balaraja	50,000,000	Bank Banten													
BPR Amal Bhakti Sejahtera	50,000,000																																		
BPR Amal Bhakti Sejahtera	50,000,000																																		
BPR Amal Bhakti Sejahtera	50,000,000																																		
BPR Berkah	50,000,000																																		
BPR Kerta Raharja	50,000,000																																		
BPR Laksana Bina Cilegon	50,000,000																																		
BPR Laksana Bina Cilegon	50,000,000																																		
BPR Laksana Bina Cilegon	50,000,000																																		
BPR Laksana Bina Cilegon	50,000,000																																		
BPR Laksana Bina Cilegon	50,000,000																																		
BPR Laksana Bina Cilegon	50,000,000																																		
BPR Laksana Bina Cilegon	50,000,000																																		
Bank Banten Cabang Ciputat	50,000,000																																		
Bank Banten Cabang Balaraja	50,000,000																																		
Bank Banten																																			

NO	RUANG LINGKUP	KONDISI SAAT INI	TEMUAN	SARAN										
				<table border="1"> <tr> <td>Cabang Rangkasbitung</td> <td>50,000,000</td> </tr> <tr> <td>Bank Banten Cabang Malingping</td> <td>50,000,000</td> </tr> <tr> <td>Bank Banten Cabang Cimone</td> <td>50,000,000</td> </tr> <tr> <td>Bank Banten Mayestik</td> <td>50,000,000</td> </tr> <tr> <td>BPR Amal Bhakti Sejahtera</td> <td>75,000,000</td> </tr> </table> <p>Mengacu pada SOP tersebut sebaiknya digabung, agar lebih aman dan memudahkan monitoring, atau ditentukan kebijakan minimal denominasi terkecilnya.</p>	Cabang Rangkasbitung	50,000,000	Bank Banten Cabang Malingping	50,000,000	Bank Banten Cabang Cimone	50,000,000	Bank Banten Mayestik	50,000,000	BPR Amal Bhakti Sejahtera	75,000,000
Cabang Rangkasbitung	50,000,000													
Bank Banten Cabang Malingping	50,000,000													
Bank Banten Cabang Cimone	50,000,000													
Bank Banten Mayestik	50,000,000													
BPR Amal Bhakti Sejahtera	75,000,000													
2	Tata Kelola Teknologi Informasi	KEPUTUSAN DIREKSI Nomor : 013/SK/DIR/V/ 2018 Tanggal 16 Mei 2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi	<ul style="list-style-type: none"> Penggunaan User ID 	<ul style="list-style-type: none"> Agar dibuatkan Serah Terima User ID apabila pemegang User ID Cuti kepada Petugas Backup. Untuk User yang tidak masuk kerja agar Petugas pengganti dibuatkan permohonan User ID baru sebagai pengganti User Akuntansi/Keuangan Yang kemudian Administrator Merubah Nama Petugas Arsip Serah Terima User ID ataupun Permohonan user ID Baru di simpan di Administrator / Bagian IT. 										
Aspek Lainnya														
1	RKAP-P 2018	RKAP-P 2018	Masih adanya akun-akun yang belum sesuai dengan RKAP baik pengelompokan/ Jenisnya maupun Nama akun: 51070003 Beban Psikotes Karyawan Baru	Agar dilakukan sinkronisasi Akun-akun sesuai dengan RKAP sehingga akan memudahkan monitoring antara RKAP terhadap Realisasi dan menjadikan RKAP sebagai salah satu acuan.										

NO	RUANG LINGKUP	KONDISI SAAT INI	TEMUAN	SARAN
			51060503 Beban Penyusutan Kendaraan Roda Dua 51060504 Beban Penyusutan Kendaraan Roda Empat 51060507 Beban Penyusutan Pagar Kantor	

2. Divisi SDM & Umum

NO	RUANG LINGKUP	KONDISI SAAT INI	TEMUAN	SARAN
Aspek Kelembagaan				
1	Struktur Organisasi	Surat Keputusan Direksi Nomor : 025/SK/DIR/VIII/2018, tanggal 06 Agustus 2018 tentang Struktur Organisasi	Belum ada informasi Struktur Organisasi yang terpasang.	Untuk memudahkan dan keterbukaan informasi / kejelasan tanggung jawab dan kedudukan agar dipasang Daftar Struktur Organisasi lengkap dengan Nama dan Jabatan.
2	Sasaran Manajemen Kinerja (SMK)	Surat Keputusan Direksi PT. Penjaminan Kredit Daerah Banten Nomor 020/SK/DIR/VII/2018 Tentang Penilaian Kinerja	belum dibuatkan sasaran kinerja untuk Sekretaris yang baru pada SIKARYO.	Agar dibuatkan Sasaran Kerja untuk Sdri. Nita Srihenita sebagai Sekretaris dan diupdate ke SIKARYO, sehingga memudahkan evaluasi tahunan.
3	Pelatihan	RKAP-P 2018	Telah dilaksanakan sesuai rencana pada RKAP-P atas rencana pelatihan yang dilaksanakan, namun hasil pelaksanaan pelatihan belum semua dilakukan analisa kesesuaian materi pelatihan dengan peserta pelatihan.	penilaian atas pelaksanaan pelatihan direkap sebagai pertanggungjawaban atas dilaksanakannya dan acuan keberhasilan untuk melihat kinerja program pelatihan yang dilakukan sehingga bisa dirating efektifitas pelatihan.

NO	RUANG LINGKUP	KONDISI SAAT INI	TEMUAN	SARAN
Aspek Keuangan				
1	Persediaan ATK / Form2	RKAP-P 2018	Pencatatan masih digabungkan.	Agar dilakukan pencatatan secara terpisah antara Persediaan barang/ATK dan Persediaan barang percetakan/Form-Form sesuai mata anggaran pada RKAP.
2	Aset / Inventaris Kantor	SOP No.06/POS/SDMU/VIII/2018 tanggal 02-08-2018 tentang Inventarisasi dan pemeliharaan Aset Perusahaan	Pencatatan akuntansi belum sesuai dengan POS tersebut, Jenis Inventaris pada SOP : <ul style="list-style-type: none"> o Tanah o Bangunan o Meubelair o Mesin/Komputer o Kendaraan o Aktiva tetap Lainnya o Asuransi <u>Pada Pencatatan Akuntansi :</u> <ul style="list-style-type: none"> o Tanah o Gedung/Bangunan kantor o Pagar Kantor Inventaris Kantor o Kendaraan Roda Empat o Kendaraan Roda Dua o Aktiva Tidak Berwujud 	Agar disesuaikan dan mengacu pada SOP dalam pencatatannya sesuai dengan kelompok jenis inventaris.
3	Aset- Aset Kantor	SOP No.06/POS/SDMU/VIII/2018 tanggal 02-08-2018 tentang Inventarisasi dan pemeliharaan Aset Perusahaan	Belum dicantumkan cara penghapus bukuan asset.	Mengingat Aset sudah mulai ada yang rusak dan tidak dapat diperbaiki, SOP agar di review dan ditambahkan cara menghapus Aset Perusahaan baik karena Rusak dan tidak dapat diservice, Aset Hilang ataupun sudah habis masa penyusutannya dan sudah tidak mempunyai manfaat pakai.
Aspek Tata Kelola Perusahaan yang Baik				

NO	RUANG LINGKUP	KONDISI SAAT INI	TEMUAN	SARAN
1	Pengadaan Barang dan Jasa	SK Direksi No.001/SK-DIR/1/201 tgl.02-01-2015 tentang pengadaan barang dan jasa	Masih menggunakan referensi POJK yang sudah diperbaharui / lama.	Agar direview dengan mengacu kepada referensi / POJK yang baru mengenai Perusahaan Penjaminan.
2	Tata Kelola Teknologi Informasi	KEPUTUSAN DIREKSI Nomor : 013/SK/DIR/V/ 2018 Tanggal 16 Mei 2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengamanan Data belum dibackup ke media lain • Password Masuk Jaringan Lokal yang lama tidak dirubah 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Agar backup database dan Aplikasi (SIJAGO) disimpan ke media CD/DVD, sebagai pelaksanaan backup ke media lain dan bukti Audit eksternal. ○ Sebagai langkah backup Akun/Email Perusahaan sebaiknya semua akun user dibackup ke PC/Laptop masing-masing dengan Outlook, sehingga memperingan kapasitas server dan bila terjadi hack bisa sebagai backup. <p>Untuk keamanan jaringan password masuk jaringan LAN / Wifi Kantor agar dirubah minimal 6 bulan sekali.</p> <p>Agar setiap permasalahan SIJAGO yang dihadapi selalu didokumentasikan melalui Aplikasi TIKET</p>

NO	RUANG LINGKUP	KONDISI SAAT INI	TEMUAN	SARAN
			<ul style="list-style-type: none"> • Aplikasi Pengaduan dan Penanganan belum sepenuhnya diefektifitaskan. 	
3	PKBL	POS Nomor : 021/SDMU/POS/I/2017 tgl. 14-05-2017 tentang Program kemitraan dan Bina Lingkungan	Belum adanya tembusan laporan kepada Divisi SDM dan Umum, maka pengawasan kegiatan dan administrasi kurang efektif	TIM yang telah dibentuk melalui Surat Tugas Direksi untuk mengelola Kegiatan PKBL Perusahaan agar memberi Tembusan Laporan kepada Divisi SDM, sehingga mengenai Rencana dan pelaksanaan serta ketentuan penerima PKBL bisa terkontrol.

Aspek Lainnya

1	Mitigasi Resiko	KEPUTUSAN DIREKSI Nomor : 026/SK/DIR/V/ 2018 Tanggal 16 Agustus 2018 tentang Pedoman manajemen Risiko	Masih terdapat ruang kerja yang kurang nyaman.	Agar dilakukan evaluasi terhadap kenyamanan tempat kerja dan rencana perubahan layout tempat kerja karyawan sehingga, <ul style="list-style-type: none"> • meja kerja karyawan tidak berada persis dibawah tangga, agar terhindar dari risiko benturan kepala dan barang2 jatuh dari tangga termasuk pada saat pembersihan. Meja Kerja Karyawan yang tertutup dari Kamar Mandi / Toilet
2	Nilai-nilai Perusahaan	Pasal 16, Tata Tertib – Tata Tertib Umum 'Setiap Karyawan diharapkan berpenampilan rapi, terpelihara serta mengenakan pakaian yang menunjukkan sikap kerja profesional.'	Tidak serasi Seragam Pakaian Kerja karyawan pria dan wanita. Senin Pria Biru wanita Coklat, Selasa Pria Coklat wanita biru.	agar dibuat surat himbauan kembali kepada karyawan perihal ketertiban pakaian kerja dan diserasikan penggunaan warna pakaian pria dan wanita pada satu hari kerja. Sehingga menimbulkan kesan yang lebih baik.

3. Divisi Teknik Penjaminan

NO	RUANG LINGKUP	KONDISI SAAT INI	TEMUAN	SARAN
----	---------------	------------------	--------	-------

NO	RUANG LINGKUP	KONDISI SAAT INI	TEMUAN	SARAN
Aspek Kelembagaan				
1	Sasaran Manajemen Kinerja (SMK)	Surat Keputusan Direksi PT. Penjaminan Kredit Daerah Banten Nomor 020/SK/DIR/VII/2018 Tentang Penilaian Kinerja	Mutasi Sdri. Aisya Andriani semula Sekretaris menjadi Staf Pemasaran, belum membuat sasaran kinerja yang relevan.	Agar membuat sasaran kinerja yang baru, sebagai acuan target pekerjaan
2	Pelatihan	Pelatihan pada RKAP-P 2018 Program Rutin : <ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti Pelatihan Manajemen Resiko • Mengikuti Pelatihan Penanganan Klaim Penjaminan • Mengikuti Pelatihan Service Excelent, Marketing Comunication (Advance) 	Pelatihan yang belum dilaksanakan sesuai RKAP-P 2018 pada Divisi TP: <ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti Pelatihan Penanganan Klaim Penjaminan. • Investigasi Klaim • Stategi Marketing • Penjaminan Level 2 • Fungsi Manajemen Risiko belum optimal dijalankan di Bagian MR 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan yang belum dilaksanakan sesuai pada RKAP-P 2018 agar bisa dilaksanakan. • Agar dibuat Rencana Pelatihan untuk peningkatan kompetensi Manajemen Risiko
Aspek Keuangan				
1	Outstanding Penjaminan Retensi Sendiri	SAL - POJK NOMOR 2 POJK.0520172017 Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin Pasal 27	Outstanding Penjaminan Retensi Sendiri sudah dilakukan berdasarkan POJK tersebut, namun dengan pencatatan terpisah secara manual yang berpotensi ketidakcocokan data OS yang terupdate.	Untuk kedepannya agar bisa diupload / dicatat pada Aplikasi / system sehingga memudahkan informasi data baik pelaporan Bulanan maupun kebutuhan Informasi lainnya. (Koordinasi dengan Bagian IT).
2	IJP yang ditangguhkan	SAL - POJK NOMOR 2 POJK.0520172017 Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin	Pengakuan IJP sudah dilaksanakan sesuai dengan masa penjaminannya., namun perhitungan komposisi penjaminan ulang masih dilakukan terpisah dan manual,yang berpotensi ketidak cermatan perhitungan IJP.	<ul style="list-style-type: none"> • Agar dibuatkan SOP untuk menentukan perhitungan IJP. • Agar IJP bisa diupload/ dicatat pada Aplikasi / system sehingga memudahkan informasi data baik pelaporan Bulanan terutama IJP lancar

NO	RUANG LINGKUP	KONDISI SAAT INI	TEMUAN	SARAN
				dan tidak Lancar.
3	Klaim dan Subrogasi	PKS / MOU dengan Penerima Jaminan <i>(sampai dengan agustus 2018 terdapat PKS/MOU dan Addendumnya sebanyak 168)</i> Sampling : PKS No. 04/DIR/PKS/03/2016 tgl. 02 Maret 2016 antara Jamkrida Banten dengan BPR Serang	<ul style="list-style-type: none"> • Pada PKS tersebut Pasal 10 Tata Cara Pembayaran Klaim point.b disebutkan Kredit dalam posisi “macet” menurut ketentuan Bank Indonesia. Sementara berkas klaim Nomor Registrasi 090/Klaim/VIII/2018, No SP: PKNP 03 2017 26 – 0018, Nama : Tubagus Encep Qosasih, Sebab : Gagal Bayar/Meninggal Dunia No Putusan : 790/S-Kel/DIR/VIII/2018 Tidak ada Putusan Kolektibilitas Macet. atau Surat Keterangan Macet. • Pada Surat Putusan Klaim tidak dijelaskan Subrogasi atau Non Subrogasi • Pada check list terdapat Surat Perjanjian Kerja, sementara pada berkas tidak ditemukan dokumen tersebut. • Pembayaran Klaim yang menjadi Subrogasi masih dicatat secara manual dan terpisah dari Aplikasi, tidak dilakukan pencatatan Administratif pada Aplikasi SIMAK. 	<ul style="list-style-type: none"> • Agar untuk Addendum atau PKS Selanjutnya ditambahkan/dimasukkan klausula syarat Klaim : <ul style="list-style-type: none"> - Macet karena PHK, Gagal bayar, Risiko Bisnis, dll (sesuai ketentuan) - “Berpotensi Macet karena Meninggal Dunia.” Dan dibuat format standar tentang hal tersebut. • Agar ditambahkan pada Surat Putusan Klaim Subrogasi atau non Subrogasi. Sehingga sebagai dasar pencatatan laporan Subrogasi. • Pada dokumen terdapat Perjanjian Kredit. Mohon check list tersebut disesuaikan. • Atas Pembayaran Klaim yang menjadi

NO	RUANG LINGKUP	KONDISI SAAT INI	TEMUAN	SARAN
			<ul style="list-style-type: none"> Proses Pengajuan, Putusan, Pembayaran dan Angsuran Klaim belum dilakukan secara keseluruhan pada Aplikasi SIPAK. 	<p>Subrogasi semestinya dicatat /dibuku juga pada rekening administratif di Aplikasi SIMAK begitu pula pencatatan Angsuran Subrogasi, sehingga memudahkan monitoring Subrogasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Agar diupdate pada Aplikasi SIPAK sehingga memudahkan keperluan data, (apabila aplikasi kurang sempurna dikoordinasikan dengan Staf IT)
4	NPG	Laporan Bulanan Perusahaan Penjaminan Kredit	Pada form Laporan 10 Besar Non Performing Guarantee posisi Agustus 2018 tidak terisi/dikosongkan, yang seharusnya diisi data yang sebenarnya.	Mohon untuk dimintakan data NPG / (NPL pada Mitra) yang penjaminannya pada Jamkrida Banten, guna memenuhi data Laporan tersebut dan minimal sebagai langkah kita dalam pemenuhan kebutuhan data OJK. (koordinasi dengan staf Laporan)

Aspek Penyelenggaraan Usaha

1	Penjaminan CBC	Standar Operasional Prosedur (SOP) Penjaminan Conditional Automatic Cover (CAC) Nomor 02/SOP/TP 2018 dan SOP Penjaminan Case By Case (CBC) Nomor 03/SOP/TP/2018	Penjaminan CBC telah dilakukan sesuai prosedur dan dilakukan kunjungan ke lokasi. Pada Aplikasi SIPAK belum ada informasi CBC maupun Non CBC	Pada Aplikasi/system agar disempurnakan dengan penambahan field / flag CBC / NON CBC (koordinasi dengan staf IT)
2	Survey Kepuasan Pelanggan	SK Inspektur Provinsi Banten Nomor 800/031/Inspektorat/2018 tanggal 31 Juli 2018 Tentang PERHITUNGAN	Survey Kepuasan Pelanggan tahun 2017, dipandang terlalu banyak pertanyaan / quisionernya yang mungkin merepotkan responder	Survey Kepuasan Pelanggan tahun 2018 agar dibuat lebih efisien terhadap pertanyaan2 yang diajukan.

NO	RUANG LINGKUP	KONDISI SAAT INI	TEMUAN	SARAN
		NILAI KINERJA BUMD JASA PENJAMINAN Survey Kepuasan pelanggan dijadikan salah satu penilaian pada Aspek Pelanggan	lambat dalam menjawab pertanyaan tersebut.	
Aspek Tata Kelola Perusahaan yang Baik				
1	Analisa MR Mitra	POJK 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Lembaga Penjamin	Belum ada Analisa Mitra secara berkala.	Agar ada penetapan evaluasi terhadap Mitra / Penerima penjaminan secara berkala atau secara khusus bila mana terjadi kondisi pasar atau regulasi yang berkaitan dengan Bisnis Usaha Mitra. Dan bisa dijadikan sebagai analisis penempatan Investasi.
2	10 Besar Surety Bond	POJK 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Lembaga Penjamin	Penjaminan Surety Bond terbesar yang masih aktif : <ol style="list-style-type: none"> 1. PT. CITRA BARU STEEL Rp.16,181,010,000.00 9/26/2018 2. PT. Giri Jaya Putra Rp. 5.568.139.400.00 12/04/2018 3. PT. TUNGGAL JAYA MANDIRI Rp.5,073,850,980.00 10/2/2019 4. PT. SINATRIA INTI SURYA Rp.4,997,000,000.00 12/31/2018 5. PT. KARYA INTI SUKSES SEJAHTERA Rp.4,917,536,000.00 12/31/2018 6. PT. ANDRY KARYA CIPTA Rp.4,344,285,400.00 12/30/2018 7. PT. PILAR CADAS 	Agar dibuat mekanisme monitoring atas 10 besar penjaminan.

NO	RUANG LINGKUP	KONDISI SAAT INI	TEMUAN	SARAN
			<p>PUTRA Rp.4,164,646,692.00 12/15/2018</p> <p>8. PT. PRIMA LAND Rp.4,152,068,800.00 12/24/2018</p> <p>9. CV ELITA JAYA MANDIRI Rp.3,375,000,000.00 8/16/2019</p> <p>10. PT. MENARA SETIA Rp.2,790,698,000.00 12/25/2018</p> <p>11. PT. BUMI SIAK MAKMUR Rp. 2,610,485,400.00 8/17/2018</p> <p>Belum terdapat jadwal monitoring berkala.</p>	

4. Divisi Unit Usaha Syariah

NO	ASPEK PEMERIKSAAN	PERIHAL MONITORING EVALUASI	KETENTUAN DAN KESESUAIAN	CATATAN	REKOMENDASI
1.	POS Divisi Unit Usaha Syariah	<p>1. SK UUS Nomor : 001/SK/DIR-S/ III/2016 Tgl. 30 Maret 2016 Ttg Ketentuan kebijakan penjamin an syariah pembiayaan Produk tif dan prosedur penanganan klaim syariah.</p> <p>2. SK UUS Nomor:002/SK/DIR-S/ III/2016 Tgl.30 Maret 2016 Ttg. Ketentuan kebijkn penjaminan syariah pembiayaan Konsumtif & prosedur penanganan klaim syariah.</p> <p>3. SK UUS Nomor:004/SK/DIR-S/</p>	<p>Hierarki POS sesuai Tata Urutan perundang – undangan :</p> <p>Memenuhi Ketentuan atas Salinan POJK Nomor : 1/POJK.05/2017 Tgl.11/1 2017 Ttg.Perizinan Usaha & Kelembagaan Lembaga Penjamin. 2/POJK.05/2017 Tgl.11/1 2017 Ttg.Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin 3/POJK.05/2017 Tgl.11/1 2017 Ttg. Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi lembaga</p>	<p>1 dan 2. Untuk Ke2(dua)SK nomor 001 dan 002 Tsb. masih menggunakan ketentuan POJK No.5/POJK. 05/2014</p> <p>Referensi terbaru Akta Pendirian berikut perubahan-perubahannya</p> <p>3. Masih menggunakan POJK Nomor 5 dan 6</p>	<p>Agar segera disesuaikan dengan POJK/ketentuan-ketentuan terbaru dalam pelaksanaan kegiatannya.</p> <p>Berikut Referensi dan Opini DPS terbaru bila ada</p> <p>3. Disesuaikan dengan POJK terbaru. Dan ditambahkan referensi dari DSN melalui Opini DPS.</p>

		<p>IV/2016 Tgl.20 April 2016 Ttg. Komite Penjaminan Syariah.</p> <p>4. SK No.04/SK/DIR/II/2017 Tgl.22 Februari 2017 Ttg. Pembentukan Komite Investasi Konvensional dan Komite Investasi Syariah.</p> <p>5. SK UUS Nomor:018/SK/DIR/V/2017 Tgl.23-5-2017 Ttg Sistem Manajemen Kas dan Investasi UUS.</p> <p>6. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.11/DSN-MUI/IV/2000 tgl 13 April 2000 Ttg Kafalah</p> <p>7. Fatwa dewan Syari'ah Nasional No.74/DSN-MUI/I/2009 Tgl.15 Januari 2009 Ttg Penjaminan Syariah</p>	<p>penjamin (Referensi terbaru)</p> <p>5). POJK Nomor:2/POJK.05/2017 Tgl.11 Jan 2017 Psl 34 (huruf b) sebagai berikut : Menempatkan Investasi pd surat berharga Syariah Negara</p>	<p>/Pojk.05/2014</p> <p>Dalam pelaksanaan penyertaannya masih bersatu dengn SBN Konvensional.</p>	<p>Ttg Penjaminan Syariah.</p> <p>Untuk segera mencari dan/atau penyertaan langsung pada perusahaan saham yang tercatat/ masuk daftar bursa efek Syariah</p>
2.	Job Description	Tindak lanjut Tanggapan atas pembinaan terhadap Agen	Pelaksanaan pembinaan dan evaluasi atas agen	Belum dilaksanakannya pembinaan agen	Segera dilaksanakan pembinaan dan evaluasi atas agen
3.	Arus KAS	<p>Dari aktivitas Operasi s/d Maret 2018 Rp.72.327.186,11</p> <p>Dari aktivitas Investasi s/d Maret '18 Rp.425.968.872,11</p> <p>Dari aktivitas pendanaan s/d Maret'18 Rp.(154.781.726,31)</p>	<p>Tujuan Laporan Arus Kas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimna perusahaan memperoleh kas. 2. Untuk apa saja perusahaan mengeluarkan kas. 3. Apa yng menyebabkan terjadinya perubahan saldo kas. <p>s/d bulan Maret 2018 Rp.893.242.435,37</p>	Untuk kenaikan dan penurunan Saldo Kas dan setara kas agar dipantau dari kas saldo awal dan kas saldo akhir.	Petugas mengetahui sumber dari Item item Arus Kas.
4	Data Klaim, Reas dan IJK Akual, IJK	Data Klaim: a. PT Virginindo Utama Karya	Piutang klaim Januari s/d Maret 2018	Belum ada progres untuk pembayaran	Untuk di pollow up dan di maintenance

	ditangguhkan.	<p>Rp. 98.510.800,-</p> <p>b. Ani Mulyani Rp.77.327.095,</p> <p>c. Utang Klaim pemb.produktf Rp.123.138.500,-</p> <p>d. Pembayaran Klaim Rp. 233.605.778,-</p>	<p>Rp.175.837.895,0 0</p> <p>Utang Klaim produktif Rp.123.138.500,-</p> <p>Pembayaran klaim Rp.233.605.778,-</p>	<p>PT Virginindo</p> <p>An.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PT Virginindo 2. Ani Mulyani 	
5	Analisa Investasi Penempatan Investasi :	<p>1. Investasi SBN Unit Syariah s sd 31 Maret 2018 sebesar Rp3.100.000,00 (Tigamilyar seratusjutarupiah) Rp11.027.781.572,63 X 20 % = Rp.2.205.556.314,53</p>	<p>POJK NOMOR 1/POJK.5/ 2016 Tgl.11-01-2016 TTG INVESTASI SURAT BERHARGA NEGARA Pasal 2 huruf c. bagi lembaga penjaminan termasuk yg menyeleng gara kan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah, paling rendah 20% (dua puluh persen) dari seluruh jumlah investasi lembaga penjaminan ;</p> <p>Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan OJK atau POJK No.36/2016 tentang Perubahan Atas POJK No.1/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.</p>	<p>Selain memiliki keuntungan yang besar, bermain <i>investasi</i> saham pun bisa menimbulkan kerugian yang besar jika tidak menerapkan strategi dengan baik.</p>	<p>Untuk lebih meningkatkan hasil investasi agar selalu dimonitor secara konsisten. Dan Bagi Hasil untuk segera di Pindahbukukan ke Rekening Bank Syariah pada kesempatan pertama</p>
		<p>2. Analisis Usulan Penempatan Deposito Unit Usaha Syariah antara kondisi keuangan akhir bulan April 2017 dengan akhir bulan Desember 2017 Data Analisa keuangan yang dipakai sama. Masing</p>	<p>Laporan Keuangan Publikasi Bank Umum Syariah (Bank Jabar Banten Syariah) dapat diunduh/dilihat pada Laporan Keuangan Publikasi Bank atau dimintakan pada</p>	<p>Dalam Analisis Usulan Penempatan Deposito Unit Usaha Syariah belum memperhatikan Kondisi Keuangan Bank Umum (BJB Syariah) yang</p>	<p>Analisa Kondisi Laporan Keuangan Bank Umum Syariah sebagai Data Analisa Agar disesuaikan dengan yang sebenarnya.</p>

	<p>masing bulan :</p> <p>- BantarGebang April'18</p> <p>Rp100.000.000,-</p> <p>- Jatibarang Sept'2017</p> <p>Rp100.000.000,-</p> <p>- Banjar Agst 2017</p> <p>Rp150.000.000,-</p> <p>- Ciawi Juli 2017</p> <p>Rp200.000.000,-</p> <p>- Sawangan Juli'2017</p> <p>Rp250.000.000,-</p> <p>- Bekasi Juli 2017</p> <p>Rp200.000.000,-</p> <p>- Ciledug Juli'2017</p> <p>Rp.100.000.000,-</p> <p>- Bantarkalong Juli'2017</p> <p>Rp100.000.000,-</p>	<p>saat penyampaian penawaran.</p> <p>Lap.Bulanan Lap.Triwulanan Lap.Semesteran Lap.Akhir Tahun</p>	<p>dipakai sebagai dasar penilaian tingkat kesehatan Bank sebenarnya.</p>	<p>Catatan juga : Pengurus BJBS sudah mengalami perubahan.</p>
	<p>3. Saldo Rekening koran bjbs Serang per 31 Des 2017</p> <p>Rp.217.639.120,65</p>	<p>Lap.Posisi Keuangan : Bjbs Serang 31 Des'17</p> <p>Rp.197.812.338,40</p>	<p>Selisih Laporan dan RK</p> <p>Rp.19.826.791,25</p>	<p>Mohon penjelasan.</p>
	<p>4. Saldo Rekening Koran : BJBS Cabang Serang Posisi ;</p> <p>31 Jan 18</p> <p>Rp.20.522.027,23</p> <p>Posisi 28 Februari 2018 sebsar</p> <p>Rp.21.096.645,42</p> <p>Posisi 31 Maret 2018 sebesar</p>	<p>Lap. Posisi Keuangan : BJBS Cabang Serang 31 Jan'18</p> <p>Rp.29.100.609,17</p> <p>28 Februari 2018 sbesar</p> <p>Rp.15.969.773,96</p> <p>Posisi 31 Maret 2018</p> <p>Rp.240.627.143,79</p>	<p>Selisih Laporan dan RK sebesar</p> <p>Rp.8.578.536,94</p> <p>Selisih Lap dan RK</p> <p>Rp.5.126.871,46</p> <p>Selisih Lap dan RK</p> <p>Rp.36.378.366,00</p>	<p>Mohon Penjelasan dan rekonsiliasi kembali setelah alasan tersebut.</p>

		Rp.204.248.777,79			
6.	Perhitungan Ujroh Agen,	<p>Beban bulan Desember'17 :</p> <p>Fee Base Income : 77.663.537</p> <p>PPh Pasal 23 1.553.271</p> <p>Ujroh IJK Net 76.110.266</p> <p>Ujroh /fee Agen : 56.064.271</p> <p>Pph Pasal 21 1.401.607</p> <p>Ujroh IJK Net 54.662.664</p> <p>Ujroh Surety Bond 1.513.658</p> <p>PPh Pasal 21 37.841</p> <p>Ujroh IJK SB Net 1.475.817</p> <p>Beban Bulan Januari 2018 :</p> <p>Fee Base Inoome : 17.660.794</p> <p>PPh Pasal 23 353.216</p> <p>Ujroh IJK Net 17.307.578</p>	<p>POJK No 2/POJK.05 / 2017 Tgl. 11 Jan 2017</p> <p>Ttg Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan</p> <p>Bab.IV Imbal Jasa</p> <p>Pasal 17 s/d Psl 20</p> <p>Ke Rek Bank Makhful Lahu</p> <p>Agen Abdulloh 005.020.602.1541</p> <p>Agen Icih Supriyati 5070.2060.13784</p> <p>Ke Rek Bank Makhful Lahu</p> <p>Agen Abdulloh 005.020.602.1541</p> <p>Agen Icih Supriyati 5070.2060.13784</p>	<p>Tidak ditemukannya Daftar nilai tarif Ujroh/IJK/IJKU dalam PKS yang diberikan kepada Makfullahu baik untuk makful lahu maupun untuk Agen.</p> <p>Karena dalam tabel permohonan IJK Makfullahu ada yang menggunakan dan ada yang tidak.</p>	Mohon penjelasan

	<p>Ujroh/fee Agen 16.565.731</p> <p>PPH Pasal 21 414.143</p> <p>Ujroh IJK Net 16.151.588</p>	<p>Ke Rek Bank Makhful Lahu</p>	
	<p>Ujroh Surety Bond 1.378.182</p> <p>PPH Pasal 21 34.455</p> <p>Ujroh IJK Net 1.343.728</p>	<p>Agen Abdulloh 005.020.602.1541</p>	
	<p>Beban Bulan Februari 2018 :</p> <p>Fee Base Income: 17.567.504</p> <p>PPH Pasal 23 351.350</p> <p>Ujroh IJK Net 17.216.154</p>	<p>Agen Ichi Supriyati 5070.2060.13784</p>	
	<p>Ujroh/fee agen : 33.286.855</p> <p>PPH Pasal 21 832.171</p> <p>Ujroh IJK Net 32.454.684</p>	<p>Agen Abdulloh 005.020.602.1541</p>	
	<p>Ujroh Surety Bond 408.774</p> <p>PPH Pasal 21 10.219</p>	<p>Agen Ichi Supriyati 5070.2060.13784</p>	

		<p>Ujroh IJK Net 398.554</p> <p>Beban Bulan Maret 2018 :</p> <p>Fee Base Income 78.761.935</p> <p>PPH Pasal 23 1.575.239</p> <p>Ujroh IJK Nett 77.186.696</p> <p>Ujroh/Fee Agen 50.527.001</p> <p>PPH Pasal 21 1.263.175</p> <p>Ujroh IJK Nett 49.263.826</p> <p>Ujroh Surety Bond 5.500.782</p> <p>PPH Pasal 21 137.520</p> <p>Ujroh IJK agen 5.363.263</p>			
7.	Analisis Kafalah CBC	<p>a). Laporan analisis Kafalah Pemb. Bank BJB Syariah KCP Depok an. CV Anugrah Abadi Kesimpulan Analisis : Agunan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berupa Tanah dan Bangunan Rumah Tempat Tinggal dikat secara Notariil 2. SHM dilakukan Pengikatan HT APHT 	<p>Agunan Harus Marketable dan disertai lampiran pengikatan HT APTH peringkat 1, 2 dst.</p>	<p>Agunan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanah Bangunan Rumah T tinggal. 2. Peralatan/Alat Usaha. <p>Mengingat Pinjaman di Bank lainnya masih besar.</p>	<p>Agar dilampirkan HT APTH setelah Realisasi. Serta disertai dengan Analisa SWOT atas Rekomendasi Analis.</p>

		<p>3. Agunan Mesi dilakukan pegikatan Fiducia.</p> <p>b). Laporan analisis Kafalah Pembiayaan Bank BJB Syariah KCP Serang An. Deni Halim</p> <p>Kesimpulan Analisis :</p> <p>1. Agunan : SHM No. 572 an. Deni Halim seluas 134 M2</p> <p>SHM No.596 an. Deni Halim seluas 240 M2</p> <p>2. Masih menggunakan kata /kalimat Nasabah</p>	<p>Agunan terlampir hanya :</p> <p>1. SHGB No.572 an.Deny Halim cq.BCA KP Jakarta</p> <p>Penggunaan kalimat Unit Syariah agar lebih ditekankan terhadap Makful Anhu</p>	<p>Agunan SHGB hanya tercatat 1 yakni No.572 an Deny Halim</p> <p>Nama tidak sama</p> <p>Ketidak konsistenan dalam penggunaan istilah Syariah.</p>	<p>1. Sebelum ada per setujuan dokumen dan nama agar di cocokan terlebih dahulu dengan legalitas yang ada.</p> <p>2. Penggunaan kalimat Unit Syariah agar lebih ditekankan terhadap Makful Anhu.</p> <p>3. Pengikatan HT APHT peringkat 1, 2 agar dilampirkan.</p>
8.	PKS dengan Mitra	<p>PKS dengan Mitra UUS</p> <p>Sampai dengan bulan Maret 2018 PKS Unit Usaha Syariah berjumlah 16 (enam belas) Mitra.</p> <p>Dari 6 (enam) sample yang dimbil adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PT Bank Jabar Banten Syariah 2. PT BPRS Attaqwa 3. PT BPRS Musyarakah Ummat Indonesia 4. PT BPRS Mulia Berkah Abadi 5. PT BPRS Cilegon Mandiri 6. PT BPRS Berkah Ramadhan 	<p>Perjanjian Kerja Sama (PKS) sesuai dengan POJK Nomor: 2/POJK.05/2017 Tanggal, 11 Januari 2017 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin Pasal 8 dan 9 harus memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama dan alamat para pihak. 2. Uraian manfaat Penjaminan; 3. Hak dan Kewajiban para pihak; 4. Cara Pembyaran IJP 5. Waktu yang diakui saat 	<p>Proses penyesuaian pembedaan sedang dilakukan atas temuan terdahulu sesuai jangka waktunya.</p>	<p>Untuk PKS dengan Mitra harap diperharikan Masa berlakunya perjanjian, ketentuan lain yang di persyaratkan sesuai dengan perkembangan dan kondisi terkini.</p> <p>Bilamana akan dilakukan addendum harap opini atas penambahan dan/atau pengurangan perjanjian dilampirkan pada lembar tersendiri</p>

			<p>diterimanya pembayaran IJP;</p> <p>6. Pembatalan Kontrak Perjanjian kerja sama para pihak;</p> <p>7. Syarat, Dasar perhitungan Klaim, dan tata cara pengajuan klaim berikut dokumen pendukung Klaim;</p> <p>8. Tata cara pelaksana peralihan hak tagih setelah klaim dibayar;</p>		
9.	Bilyet Deposito Jan s/d Maret 2018	<p>HIK (ARO) Rp.1000.000.000,-</p> <p>BPRS Cilegon Rp.500.000.000,-</p> <p>BPRS Cilegon Rp.100.000.000,-</p> <p>BPRS Cilegon Rp. 50.000.000,-</p> <p>PT BPRS Attaqwa Rp.100.000.000</p> <p>PT BPRS Attaqwa Rp.750.000.000</p> <p>PT BPRS Attaqwa Rp.750.000.000</p> <p>BPRS Mu.amalah Rp.750.000.000</p> <p>BPRS Mulia BA Rp.1.000.000.000,</p> <p>BPRS Mulia BA Rp. 300.000.000,-</p> <p>BPRS Mulia BA Rp. 150.000.000,-</p> <p>BPRS Mulia BA Rp. 50.000.000,-</p> <p>BPRS Mulia BA Rp. 50.000.000,-</p> <p>Deposito Bank Syariah</p>	<p>Rek. BJBS Syariah 005-010-200-1122</p> <p>Rek. 1110109465</p> <p>Rek. 1110109465</p> <p>Rek. 1110109465</p> <p>Rek. ?</p> <p>Rek. ?</p> <p>Rek. ?</p> <p>Rek. 110101650</p> <p>Rek.005-010- 2001122</p> <p>Rek.005-010- 2001122</p> <p>Rek.005-010- 2001122</p> <p>Rek.005-010- 2001122</p>	<p>Rek. BPRS Ybs</p> <p>Norek penampungan nisabah bagi hasil tidak dicantumkan</p> <p>Rek BPRS Ybs.</p> <p>Rek.BJBS Syariah Serang</p> <p>Rek.BJBS Syariah Serang Pada Kesempatan pertama Tgl. Jatuh tempo agar di adakan</p>	<p>Agar dicantumkan rekening nisbah Bagi hasilnya.</p> <p>Nama perusahaan harus disesuaikan dengan AD/ART Perusahaan</p> <p>Alamat Untuk segera di Perbaharui dan pencantuman rekening Nisabah bagi hasil.</p> <p>Agar di Rincia per</p>

	<p>Mustindo No.3310100356 Rp. 250.000.000, Tgl. 21 Juli 2017 tercatat an. PT. Penjamin Kredit Daerah Banten</p> <p>BPR Syariah Cempaka Rp.50.000.000,- Tgl.03- Agst-2017 sd 03 Febr 2018</p> <p>An Jamkrida Banten PT</p> <p>Ruko A Yani No.R.15-16 Jl. Jend. A.Yani No. 157</p> <p>BJB Syariah Cldg Rp.250.000.000, (Rek. 524191321409001360 – (Pokok Rek. .005-010-2001122)</p> <p>BJB Syariah Cldg Rp.100.000.000, Rek. 524191321409001360 Rek. 005-010- 2001122</p> <p>BJBS Rks Bitung Rp.350.000.000,- (704191321409001360 – (pokok) 0050102001122) (Nisabah)</p> <p>BJBS Rks Bitung Rp.150.000.000,- Rek.704-010-2000212 – (Pokok)</p> <p>Rek.704-010-2000212 (Nisbah)</p> <p>BJBS Ciputat</p>	<p>2001122 Rek.005-010- 2001122</p> <p>Rek. .005-010- 2001122</p> <p>An. Penjaminan Kredit Daerah Banten (PT Jamkrida Banten) Sesuai dengan AD/ART.</p> <p>Rek. Ke... ?</p> <p>Jl Raya Pandeglang No99 KM 4 Link.Karundang</p> <p>Rek. 524191321409001360 Rek. 005-010- 2001122</p> <p>Rek.005-010- 2001122</p> <p>Rek.005-010- 2001122</p> <p>Rek.704-010- 2000212</p> <p>Rek.5401913214090 01360</p> <p>Jk waktu=ARO tidak ada</p> <p>Rek.5401913214090 01360</p> <p>Jk waktu=ARO tidak ada</p> <p>Rek.5401913214090 01360</p> <p>Rek.704-010- 2000212</p> <p>Tidak ada ARO</p>	<p>perubahan</p> <p>Masih Menggunakan Alamat Lama</p> <p>Saat jatuh tempo ke Rek.005-010- 2001122</p> <p>Rek.005-010- 2001122</p> <p>Saat jatuh tempo ke Rek. 5241913214090013 60</p> <p>Rek.704-010- 2000212</p> <p>Rek.5401913214090 01360</p> <p>Jk waktu=ARO tidak ada</p> <p>Rek.5401913214090 01360</p> <p>Jk waktu=ARO tidak ada</p> <p>Rek.5401913214090 01360</p> <p>Tidak ada ARO</p>	<p>bulyet memudahkan kontrol dan register.</p> <p>Untuk memudah rekonsiliasi dan alur kas agar ditetapkan satu rekening penampungan</p> <p>Untuk bulan berikutnya agar dilakukan pencatatan tersendiri.</p> <p>Mohon penjelasan</p> <p>Untuk dilengkapi</p> <p>Mohon penjelasan</p> <p>Untuk dilengkapi Mohon penjelasan</p> <p>Untuk dilengkapi Untuk dilengkapi</p> <p>Untuk dilengkapi Untuk dilengkapi</p> <p>Untuk dilengkapi Untuk dilengkapi Untuk dilengkapi Untuk dilengkapi</p>
--	---	---	---	---

		Rp.1.000.000.000,-		Tidak ada ARO	
		540191321409001360 – (Pokok)		Tidak ada ARO & Stempel	
		540192090502003360 (Nisbah)	Rek.54019209050200 3360	Tidak ada ARO & Stempel	
		BJBS BSD Rp.1.000.000.000,-		Tidak ada ARO Tidak ada ARO Tidak ada ARO Tidak ada ARO Tidak ada ARO	
		525191321409001360 – (pokok)			
		525192090502003360 (Nisbah)	Rek.54019209050200 3360		
		BJBS Paneglang Rp1.000.000.000,			
		507191321409001360 – (pokok)	Rek.54019209050200 3360		
		507192090502003360 (nisbah)			
		BJBS Tangerang Rp.500.000.000,-	Rek.0050102001122		
		BJBS Tangerang Rp.250.000.000,-	Rek.0050102001122		
			Rek.0050102001122		
		BJBS Sawangan Rp.250.000.000,-	Rek.0050102001122		
		BJBS Sawangan Rp.200.000.000,-	Rek.0050102001122		
			Rek.0050102001122		
		BJBS Ciawi Rp.200.000.000,-	Rek.0050102001122		
			Rek.0050102001122		
		BJBS BntarKlong Rp100.000.000,-	Rek.0050102001122		
		BJBS KC.Bekasi	Rek.0050102001122		

		Rp.200.000.000,- BJBS KCP Banjar Rp.150.000.000,- BJBS Jatibarang Rp.100.000.000,- BJBS BtrGebang Rp.100.000.000,-			
10	Bukti Transaksi Keuangan : Januari s/d Maret 2018	Perjalanan Dinas Bulan : Januari 2018 Rp. 3.733.842,- Februari 2018 Rp. 5.851.842,- Maret 2018 Rp.11.698.000,-	RKAP 2018 : Rp.6.500.000,- Rp.6.500.000,- Rp.6.500.000,-	Biaya s/d bulan Maret 2018 Rp.21.283.684,- RKAP Rp.19.500.000,- Lebih Rp. 1.783.684,-	
		Kas On Hand tgl.09/03/2018 Cek cca bjbs 12-03-2018 Pemb./jurnal 14/3/2018/2497 Rp23.947.394,-	Dalam Satu hari/tgl. Pencatatan Deklarasi Asuransi	Beda tanggal pencatatan dan Jurnal	
		1. Dokumen pembukuan/BT 2. Usulan Jurnal 3. Memo Jurnal	1. Bukti Transaksi 2. Jurnal	Tidak sesuai dgn POS	
		Memo Jurnal tgl. 15 Jan 2018: D.11010102 Kas On Hand Rp160.000 K.19080206 Aktv Lain2 Rp160.000 D.11010102 Kas On Hand Rp1068557 K.190890206 Akt Lain2 Rp1068557 D.11010102 Kas On Hand Rp160000 K.190890206 Akt Lain2 Rp.160000	Memo Jurnal dalam satu nomor bukti : D.11010102 Rp1388557 K.19080206 Rp. 60.000 K.19080206 Rp1068557 K.19080206 Rp 160.000	PSAK 45 bersifat single entity, yaitu hanya jenis laporan untuk masing – masing kategori , yaitu : satu neraca , satu laporan aktivitas , dan satu laporan arus kas.	
		Memo Jurnal tgl.28 Maret 2018 / 2565,2566,2567,2568,2569,2570,	D K	Format/Redaksi Jurnal	Redaksi Jurnal disesuaikan dengan Transaksinya.
		Memo Jurnal Tgl.17 Jan 2018 : Beban Ops Uang	Memo Jurnal dilakukan pembukuan pada		Tanggal, Transaksi disamakan dengan pebukuan.

		Makan Perusahaan yang dibayarkan tgl.09 dan 16 Jan 2018 dibuku tanggal 17 Januari 2018	tanggal saat dibayarkan yakni tgl.9 dan 16 Januari 2018.		
		Memo Jurnal Tgl.28 Febr 2018/ 2415 ; Pembukuan atas : IJK Produktif dan Non Produktif	Semua jenis transaksi harus dicatat dan secara kronologis. Penggunaan Jurnal khusus : hanya pada perusahaan besar yang transaksinya banyak.	Konfirmasi jurnal umum.	Konfirmasi atas pembukuan tgl. 28 Februari 2018.
		Memo jurnal tgl.09 Mart 2018/ 2448	Dilampirkan dengan rincian penggunaan	pengisian kas on Hand diperjelas keperuntukannya	Kedepan Agar dilengkapi
		Memo jurnal Tgl. 16 Maret 2018/2509 sd 2512 Uraian : Koreksi Hutang BPJS ada lebih ada kurang dalam pembukuan dilakukan penambahan/ pengurangan secara langsung	Jurnal koreksi Akuntansi yang benar: 1).D. juml yang salah K. juml yang salah 2). D. Juml yg sbenrnya K. Jmlh yg sbnrnya	Jurnal harus dipelajari secara kronologi per kasus/jurnal. (koreksi dibuat sbg pndingn antara jurnal pngghpsn dg jurnal yshrsnya dbuat/dicatat.	Jurnal koreksi tidak dilakukan penambahan atau pengurangan secara langsung.

D. Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan tata kelola teknologi

1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris

- Pengawasan aktif Direksi
 - a. Menyusun pedoman atau kebijakan dalam bentuk SK Direksi tentang manajemen resiko, system pengendalian internal dan tata kelola teknologi informasi
 - b. Menyusun perangkat kebijaksanaan dalam bentuk prosedur Operasional Standar tentang manajemen resiko, system pengendalian internal dan tata kelola teknologi informasi
- Pengawasan Dewan Komisaris
 - a. Sistem pengawasan yang dilakukan oleh Komite Pemantau Resiko dalam

bentuk Memo kepada Direksi apabila terjadi potensi resiko.

2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penggunaan teknologi informasi

Seluruh kebijakan dan prosedur perseroan telah diatur dalam Prosedur Operasional Standar (POS) yang diterbitkan atas pengesahan Direksi.

Dalam rangka penggunaan Sisitim Informasi berbasis Tehnologi dikembangkan Aplikasi yang disebut dengan “**Sistim Penjaminan Go Online (SIJAGO)**” yang mana Aplikasi tersebut terdiri dari ;

- **Sistim Informasi Manajemen Akuntansi Konvensional (SIMAK)**
- **Sistim Informasi Penjaminan Konvensional (SIPAK)**
- **Sistim Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (SIBAJA)**
- **Sistim Informasi Karyawan On-Line (SIKARYO)**
- **Sistem Kafalah (SIKAF)**
- **Sistim Informasi Manajemen Akuntansi Syariah (SIMAS)**
- **Sistim Informasi Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Elektronik (E-RKAP)**

Dan seluruh Aplikasi tersebut sedang dalam pengembangan untuk terintegrasi.

3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko pemanfaatan teknologi informasi

Sedang disusun Pedoman untuk melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko pemanfaatan teknologi informasi.

4. Struktur organisasi system informasi

Sistim Informasi masih dibawah tanggung jawab Divisi Sumber Daya Manusia dan Umum.

5. Sistem pengendalian internal atau penggunaan teknologi informasi

Telah disusun pedoman/kebijakan dalam bentuk SK Direksi tentang Tata Kelola Teknologi Informasi SK nomor: 13/SK/DIR/V/2018.

6. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh

- a. Pengembangan Sistem
- b. Pembuatan Sistem

- c. Integrasi Sistem
- d. Maintenance server
- e. Maintenance Networking
- f. Maintenance Sistem
- g. Maintenance Back Up Database

E. Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pegawai

1. Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS
 - a. Remunerasi dalam bentuk non natura, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (*benefit*), kompensasi berbasis saham, tantiem dan bentuk remunerasi lainnya

URAIAN	DIREKSI	DEWAN KOMISARIS	DPS
Gaji Pokok	V	V	V
Tunjangan Jabatan	V	V	V
Tunjangan Cuti	V	-	-
Tantiem	V	V	V
THR	V	V	V

- b. Fasilitas lain dalam bentuk natura/non natura yaitu penghasilan tidak tetap lainnya, termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan fasilitas lainnya

URAIAN	DIREKSI	DEWAN KOMISARIS	DPS
Mobil Inventaris	V	-	-
Tunjangan Perumahan	V	-	-
Tunjangan Telekomunikasi	V	-	-
Asuransi Kesehatan (<i>Rawat Inap</i>)	V	V	V
BPJS Kesehatan	V	V	V
BPJS Ketenagakerjaan	V	V	V

2. Pengungkapan paket atau kebijakan remunerasi dalam 1 (satu) tahun
- a. Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang ditetapkan RUPS
- Tidak ada
- a. Remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS paling sedikit mencakup jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota DPS dan jumlah seluruh

Jumlah yang diterima dalam satu Tahun		Remunerasi *)	Fasilitas lain dalam bentuk natura **)
Direksi	Jumlah Direksi	2	<ul style="list-style-type: none"> - Kendaraan Dinas - BBM - Asuransi Kesehatan (Rawat Inap) - BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan - Tabungan Pensiun Bumi Putra Syariah
	Nominal (Jutaan Rupiah)	Rp. 1.252.628.252,-	
Dewan Komisaris	Jumlah Dewan Komisaris	3	
	Nominal (Jutaan Rupiah)	Rp. 1.138.327.408,-	
DPS	Jumlah DPS	2	
	Nominal (Jutaan Rupiah)	Rp. 223.022.268,-	

Keterangan:

kebijakan remunerasi dan fasilitas lain

*) Termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (*benefit*), kompensasi berbasis saham, tantiem, dan bentuk remunerasi lainnya dalam bentuk non natura

**) Perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dan sebagainya.

- c. Jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) tahun secara tunai	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris	Jumlah DPS
Di atas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)			
Di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) s.d Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)			
Di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) s.d Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)			
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kebawah	2	3	2

3. Rasio gaji tertinggi dan terendah

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai pada bulan terakhir tahun pelaporan.

Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan berikut:

- 1) rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah;

Tertinggi	Terendah
Rp. 14.523.049,-	Rp. 3.331.285,-

2) rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan terendah;

Tertinggi	Terendah
Rp. 34.750.000,-	Rp. 28.950.000,-

3) rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah; dan

Tertinggi	Terendah
Rp. 22.300.000,-	Rp. 18.840.000,-

4) rasio gaji anggota Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi.

Direksi Tertinggi	Pegawai Terendah
Rp. 34.750.000,-	Rp. 3.331.285,-

F. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Lembaga Penjamin

- a. Hasil rating yang telah dilakukan oleh lembaga rating/pemeringkat oleh FITCH Rating pada bulan Maret 2019, PT. Jamkrida Banten mendapatkan peringkat BBB-id;
- b. Perusahaan telah membuat brosur, *leaflet*, untuk memberikan informasi mengenai jasa penjaminan kepada terjamin atau calon terjamin, bahkan melalui koran/media massa dan website perusahaan.
- c. Tata cara pengaduan dan penyelesaian sengketa kepada terjamin telah dibuat POS (Prosedur Operasional Standar) , sehingga ada standar yang sama dalam penyelesaian sengketa dimaksud;
- d. Kebijakan pembelian kembali saham, belum pernah diputuskan dalam RUPS.
- e. Publikasi Laporan Keuangan setiap tahun dimuat dalam surat kabar lokal dan website.

Telah dilakukan pemeringkatan oleh FITCH Rating, Lembaga Pemeringkat yang terdaftar di OJK. Hasil rating -BBB memiliki karakteristik keamanan keuangan yang memadai relatif terhadap perusahaan lainnya di Indonesia, namun lebih mungkin akan terpengaruh oleh perubahan keadaan bisnis yang merugikan dibandingkan perusahaan lain dengan peringkat lebih tinggi. Dengan mendapatkan pemeringkatan -BBB, jamkrida banten sudah bisa bekerjasama dengan Bank

Umum Nasional sesuai aturan Bank Indonesia. Dari beberapa perusahaan penjaminan yang ada di Indonesia, Jamkrida Banten menjadi salah satu dari 3 perusahaan yang telah memperoleh pemeringkatan dari lembaga rating.

Profile Jamkrida telah disajikan secara cukup informatif dalam website www.jamkridabanten.co.id termasuk didalamnya disediakan sarana untuk pengaduan dan penyelesaian sengketa.

G. Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan

1. Rencana jangka panjang dan rencana kerja

Rencana jangka Panjang tahun 2016 – 2020 sudah dibuat dan saat ini sedang dibuat rencana jangka Panjang 2020 – 2024.

2. Anggaran tahunan

Rencana bisnis/Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) disusun setiap tahun dan mengacu kepada POJK Nomor 3 POJK.05 2017 Tata Kelola Lembaga Penjamin BAB IV rencana bisnis tahunan dan Permendagri Nomor 118 Tahun 2018.

H. Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham

No.	Nama	Kategori Kepemilikan Saham *)	Jumlah Nominal Kepemilikan Saham	Persentase Kepemilikan Saham
NIHIL				

I. Pengungkapan hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham

Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS dimaksud menjabat.

1. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.

No.	Nama	Hubungan Dengan	Bentuk Hubungan				Keterangan
			Keuangan		Keluarga		
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	
NIHIL							

2. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.

No.	Nama	Hubungan Dengan	Bentuk Hubungan				Keterangan
			Keuangan		Keluarga		
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	
NIHIL							

3. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota DPS dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.

No.	Nama	Hubungan Dengan	Bentuk Hubungan				Keterangan
			Keuangan		Keluarga		
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	
NIHIL							

J. Pengungkapan hal penting lainnya:

- Pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal
-----NIHIL-----
- Transaksi material dengan pihak terkait
-----NIHIL-----
- Benturan kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi

No.	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan (*)
NIHIL					

Keterangan:

*) Tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku

4. Informasi material lain mengenai Lembaga Penjamin

-----NIHIL-----

5. Pengunduran diri atau pemberhentian Komisaris Independen

-----NIHIL-----

6. Sertifikasi

No	Materi Sertifikasi	Tempat / Tanggal	Penyelenggara
1.	Certified In Risk Governance Professional	Jakarta, 08 Juni 2017	LSPMR
2.	Certified In Risk Governance Professional	Batam, 26-27 September 2017	LSPMR
3	Certified In Risk Governance Professional	Tangerang, 9-10 April 2019	LSPMR

7. Tenaga kerja asing

-----NIHIL-----

8. Jumlah penyimpangan internal (*internal fraud*)

-----NIHIL-----

9. Permasalahan hukum

-----NIHIL-----

10. Etika bisnis Lembaga Penjamin

Etika Bisnis tertuang dalam SK Direksi Nomor : 044/SK-DIR/12/2015
Tentang CODE of CONDUCT (PEDOMAN PERILAKU) PT. Penjaminan Kredit
Daerah Banten.

Serang, 26 April 2018

PT Penjaminan Kredit Daerah Banten
Menyetujui,

Direksi

Hendra Indra Rachman
Direktur Utama

Ahmad Rohendi
Direktur

Dewan Komisaris

Didin Rasyidin Wahyu
Komisaris Utama

Master Irfan Ibrahim
Komisaris Independen

Dewan Pengawas Syariah

H. Fajri Ali

KH. Zainal Abidin Sujai